

LAPORAN KEUANGAN

Audited

TAHUN 2010



BAGIAN ANGGARAN (022)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Ri Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perhubungan adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 917.409.760.257,- atau 116,12 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp. 15.562.079.341.934,- atau 86,96 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.80.007.078.957.656,- dan Kewajiban sebesar Rp. 486.495.561.796,- sehingga Ekuitas Dana Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 79.520.583.395.860,-.

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
4. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK-RI (*Audited*).

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2010 (*Audited*) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Mei 2011
MENTERI PERHUBUNGAN


FREDDY NUMBERI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	ix
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	x
Pernyataan Tanggung Jawab	
I. Ringkasan	1-2
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT perbandingan 2010 dan 2009)	3-4
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2010 dan 2009)	5-6
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga	7-24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	24-28
A.4. Kebijakan Akuntansi	28-34
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	35
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	35-36
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	37-43
B.3. Catatan Penting Lainnya	44-63
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	64
C.1. Posisi Keuangan Secara Umum	64
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	65-94
C.3. Catatan Penting Lainnya	95-100
D. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	100-106
E. Kejadian Setelah Tanggal Neraca (Subsequent Event)	106
F. Pengungkapan Penting Lainnya	106-107

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor PER- 65/PB/2010;

- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna;

- Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan

Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK

Lampiran Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

DAFTAR TABEL

1. Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Kementerian Perhubungan Tahun 2010 (<i>Audited</i>) dan Tahun 2009 (<i>Audited</i>)	22
2. Realisasi Belanja Berdasarkan Program Kementerian Perhubungan Tahun 2010	22
3. Rincian Anggaran Satker BLU	25
4. Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon I	25
5. Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon I	28
6. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan <i>netto</i> Tahun 2010 (<i>Audited</i>)	36
7. Realisasi PNBPN <i>netto</i> Tahun 2010 (<i>Audited</i>) dan 2009 (<i>Audited</i>) Menurut Tingkat Eselon I	38
8. Realisasi Pendapatan BLU 2010 (dalam Rupiah)	39
9. Perbandingan Realisasi Tahun 2010 dan Tahun 2009 (dalam Rupiah)	39
10. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2010 Berdasarkan Satker (dalam Rupiah)	39
11. Realisasi Belanja <i>Netto</i> Tahun 2010 (<i>Audited</i>) dan 2009 (<i>Audited</i>) <i>Netto</i> Menurut Tingkat Eselon I	41
12. Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2010 (<i>Audited</i>) dan 2009 (<i>Audited</i>)	42
13. Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2010 (<i>Audited</i>) dan 2009 (<i>Audited</i>)	42
14. Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2010 (<i>Audited</i>) dan 2009 (<i>Audited</i>)	44
15. Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 dan Tahun 2009 (<i>Audited</i>)	64
16. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I	65
17. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2009	65
18. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010	66
19. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	66
20. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2009	66
21. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010	67
22. Pungutan Diluar Mekanisme APBN yang Belum Disetor ke Kas Negara	67
23. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I	68
24. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	69
25. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2009 Ke Kas Negara	69
26. Pembayaran Saldo Kas per 31 Desember 2009 Kepada Pihak Lain	69
27. Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 Ke Kas Negara	69
28. Pembayaran Saldo Kas per 31 Desember 2010 Kepada Pihak Lain	69
29. Besarnya Saldo Kas Pada Masing-Masing BLU per 31 Desember 2010	70
30. Piutang Bukan Pajak per Eselon I	70
31. Daftar Klasifikasi Piutang	71
32. Rekapitulasi Umur Piutang Tahun Anggaran 2010	71

33. Saldo Piutang Bukan Pajak Diten Perhubungan Udara per 31 Desember 2010 dan 2009 (<i>Audited</i>)	72
34. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I	73
35. Rincian Uang Muka Belanja per Eselon I	73
36. Rincian Uang Muka Belanja Ditjen Perhubungan Udara per 31 Desember 2010	74
37. Rincian Persediaan per Eselon I	74
38. Rincian Persediaan Masing-Masing Satker pada Badan Layanan Umum	74
39. Daftar Persediaan per 31 Desember 2010	75
40. Posisi Aset Tetap	75
41. Posisi Aset Tetap Badan Layanan Umum (BLU)	76
42. Daftar Perbandingan Aset Tetap Antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2010	76
43. Uraian Atas Perbedaan Aset Tetap Lainnya per Eselon I	77
44. Rincian Perbedaan Aset Tetap Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	78
45. Selisih Aset Tetap Lainnya Ditjen Perhubungan Laut	79
46. Selisih Aset Tetap Lainnya Ditjen Perhubungan Udara	80
47. Rincian Tanah per Eselon I	82
48. Rincian Peralatan dan Mesin per Eselon I	83
49. Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I	84
50. Rincian Jalan,Irigasi dan Jaringan per Eselon I	85
51. Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I	86
52. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Jenisnya	86
53. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	86
54. Rincian Kostruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I	87
55. Rincian Aset Lainnya per Eselon I	87
56. Aset Lainnya Menurut Jenisnya	87
57. Rincian Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I	88
58. Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	89
59. Rincian Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum (BLU)	89
60. Rincian Aset Lain-lain per Eselon I	90
61. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I	90
62. Rincian Uang Muka Dari KPPN per Eselon I	91
63. Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan per Eselon I	91
64. Rincian Cadangan piutang per Eselon I	92
65. Rincian Cadangan Persediaan per Eselon I	92
66. Rincian Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	93
67. Rincian Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	93
68. Rincian Di Investasikan Dalam Aset Tetap Per Eselon I	94

69. Rincian Di Investasikan Dalam Aset Lainnya Per Eselon I	94
70. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Aset oleh Tim Keppres 13	95

DAFTAR GRAFIK

1.	Realisasi Pendapatan Tahun 2010 (<i>Audited</i>) dan Tahun 2009 (<i>Audited</i>) per Jenis Penerimaan	38
2.	Realisasi PNBPN Tahun 2010 (<i>Audited</i>) dan Tahun 2009 (<i>Audited</i>) Menurut Jenisnya (dalam Milyar Rupiah)	38
3.	Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 (<i>Audited</i>) dan 2009 (<i>Audited</i>)	40
4.	Komposisi Realisasi Belanja Netto Menurut Jenis Belanja TA 2010	41
5.	Kompisisi Neraca	64
6.	Posisi Aset Tetap	76

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN			Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah			
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	37
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	37-38
Catatan	B.2.1.2.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	38
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU	39-40
Belanja Negara			
Catatan	B.2.2	Belanja Negara	40-41
Catatan	B.2.2.1	Belanja	41
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	42
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	42-43
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	43
Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	44-63
NERACA			
ASET			
Aset Lancar			
Catatan	C.2.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	65-66
Catatan	C.2.2	Kas di Bendahara Penerimaan	66-67
Catatan	C.2.3	Kas Lainnya dan setara Kas	68-69
Catatan	C.2.4	Kas Pada Badan Layanan Umum (BLU)	70
Catatan	C.2.5	Piutang Bukan Pajak	70-72
Catatan	C.2.6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	73
Catatan	C.2.7	Uang muka belanja	73-74
Catatan	C.2.8	Persediaan	74-75
Aset Tetap			
Catatan	C.2.9	Aset Tetap	75-81
Catatan	C.2.9.1	Tanah	81-82
Catatan	C.2.9.2	Peralatan dan Mesin	82-83
Catatan	C.2.9.3	Gedung dan Bangunan	83-84
Catatan	C.2.9.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	84-85
Catatan	C.2.9.5	Aset Tetap Lainnya	85-86
Catatan	C.2.9.6	Konstruksi Dalam pengerjaan	86-87

Aset Lainnya

Catatan	C.2.10	Aset Lainnya	87
Catatan	C.2.11	Tagihan Penjualan Angsuran	88
Catatan	C.2.12	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	88
Catatan	C.2.13	Aset Tak Berwujud	88-89
Catatan	C.2.14	Aset Lain-lain	89-90

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Catatan	C.2.15	Utang kepada Pihak Ketiga	90
Catatan	C.2.16	Pendapatan Diterima Dimuka	91
Catatan	C.2.17	Uang Muka dari KPPN	91
Catatan	C.2.18	Pendapatan yang Ditangguhkan	91

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Catatan	C.2.19	Cadangan Piutang	92
Catatan	C.2.20	Cadangan Persediaan	92
Catatan	C.2.21	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	92-93
Catatan	C.2.22	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	93
Catatan	C.2.23	Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	93
Catatan	C.2.24	Dana Lancar BLU	94

Ekuitas Dana Investasi

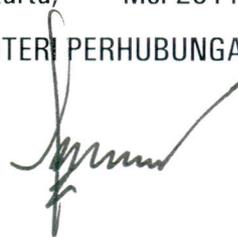
Catatan	C.2.25	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	94
Catatan	C.2.26	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	94

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (BA 022) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2011
MENTERI PERHUBUNGAN



FREDDY NUMBERI

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2010 ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (*Audited*).

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2010 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2010 (*Audited*) ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Perhubungan dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2010 (*Audited*) adalah sebesar Rp. 917.409.760.257 ,- atau 116,12 persen dari anggarannya.

Realisasi Belanja tahun 2010 (*Audited*) adalah sebesar sebesar Rp. 15.562.079.341.934,- atau 86,96 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari Realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 14.561.133.126.456,- atau 90,72 persen dari anggarannya, Realisasi Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 979.216.495.869,- atau 58,84 persen dari anggarannya, dan Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 21.729.719.600,- atau sebesar 12,01 dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010 (*Audited*) dan 2009 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut:

	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)		31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	790.021.618.357	917.409.760.257	403.807.734.740	862.501.670.835
Belanja Rupiah Murni	16.050.293.551.000	14.561.133.126.465	16.932.086.254.000	14.536.535.275.148
Belanja Pinjaman Luar Negeri	1.664.325.802.000	979.216.495.869	2.599.912.013.000	1.013.554.655.231
Belanja Hibah	180.935.554.000	21.729.719.600	34.287.906.000	824.457.350
JUMLAH	17.895.554.907.000	15.562.079.341.934	19.566.286.173.000	15.550.914.387.729

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Kementerian/Lembaga mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2010.

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 80.007.078.957.656,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 1.723.628.795.671,- Aset Tetap sebesar Rp. 76.948.072.224.400,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.335.377.937.585,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 486.495.561.796,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 486.495.561.796,-.

Sementara itu Jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 79.520.583.395.860,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 1.237.133.233.875,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 78.283.450.161.985,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) dapat disajikan sebagai berikut:

	(dalam rupiah)		
	31 Desember 2010 (Audited)	31 Desember 2009 (Audited)	Nilai kenaikan/ (penurunan)
Aset	80.007.078.957.656	64.767.792.453.679	15.239.286.503.977
Aset Lancar	1.723.628.795.671	1.563.810.153.465	159.818.642.206
Aset Tetap	76.948.072.224.400	62.272.469.719.509	14.675.602.504.891
Aset Lainnya	1.335.377.937.585	931.512.580.705	403.865.356.880
Kewajiban	486.495.561.796	95.754.704.228	390.740.857.568
Kewajiban Jangka Pendek	486.495.561.796	95.754.704.228	390.740.857.568
Ekuitas Dana	79.520.583.395.860	64.672.037.749.451	14.848.545.646.409
Ekuitas Dana Lancar	1.237.133.233.875	1.468.055.449.237	(230.922.215.362)
Ekuitas Dana Investasi	78.283.450.161.985	63.203.982.300.214	14.848.545.646.409
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	80.007.078.957.656	64.767.792.453.679	15.239.286.503.977

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	URAIAN	2010				2009			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1	PENERIMAAN DALAM NEGERI	790,021,618,357	917,409,760,257	127,388,141,900	116.12	403,807,734,740	862,501,670,835	458,693,936,095	213.59
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	790,021,618,357	917,409,760,257	127,388,141,900	116.12	403,807,734,740	862,501,670,835	458,693,936,095	213.59
A.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	790,021,618,357	917,409,760,257	127,388,141,900	116.12	403,807,734,740	862,501,670,835	458,693,936,095	213.59
B	BELANJA								
B.1	Rupiah Murni	16,050,293,551,000	14,561,133,126,465	(1,489,160,424,535)	90.72	16,932,086,254,000	14,559,624,947,041	(2,372,461,306,959)	85.99
	Belanja Pegawai	1,279,373,663,000	1,158,162,941,133	(121,210,721,867)	90.53	1,273,220,885,000	1,076,444,380,431	(196,776,504,569)	84.54
	Belanja Barang	3,199,719,542,000	2,696,211,721,291	(503,507,820,709)	84.26	3,165,928,651,000	2,197,780,260,816	(968,148,390,184)	69.42
	Belanja Modal	11,571,200,346,000	10,706,758,464,041	(864,441,881,959)	92.53	12,492,936,718,000	11,285,400,305,794	(1,207,536,412,206)	90.33
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.2	Pinjaman Luar Negeri	1,664,325,802,000	979,216,495,869	(685,109,306,131)	58.84	2,599,912,013,000	990,464,983,338	(1,609,447,029,662)	38.10
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Barang	0	0	0	0.00	1,297,996,000	1,392,839,080	94,843,080	107.31
	Belanja Modal	1,664,325,802,000	979,216,495,869	(685,109,306,131)	58.84	2,598,614,017,000	989,072,144,258	(1,609,541,872,742)	38.06
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.3	Hibah	180,935,554,000	21,729,719,600	(159,205,834,400)	12.01	34,287,906,000	824,457,350	(33,463,448,650)	2.40

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	URAIAN	2010				2009			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Barang	4,305,011,000	1,419,565,100	(2,885,445,900)	32.97	1,412,246,000	824,457,350	(587,788,650)	58.38
	Belanja Modal	176,630,543,000	20,310,154,500	(156,320,388,500)	11.50	32,875,660,000	0	(32,875,660,000)	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	17,895,554,907,000	15,562,079,341,934	(2,333,475,565,066)	86.96	19,566,286,173,000	15,550,914,387,729	(4,015,371,785,271)	79.48
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.a	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.b	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2.a	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.2.b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

JAKARTA MEI 2011
MENTERI PERHUBUNGAN

FREDDY NUMBERI

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIKLT
 Tanggal : 06/05/11
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2010	2009	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	854,093,528	905,181,222	(51,087,694)	(5.64)
Kas di Bendahara Penerimaan	345,809,190,529	77,772,063,669	268,037,126,860	344.64
Kas Lainnya dan Setara Kas	126,491,895	8,223,604,989	(8,097,113,094)	(98.46)
Kas pada Badan Layanan Umum	93,038,372,556	36,760,635,569	56,277,736,987	153.09
Piutang Bukan Pajak	222,641,909,452	574,528,376,904	(351,886,467,452)	(61.24)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	6,308,896,481	12,000,000	6,296,896,481	52,474.13
Uang muka belanja	3,372,081,629	0	3,372,081,629	0.00
Persediaan	1,050,708,835,328	865,577,968,522	185,130,866,806	21.38
Persediaan Badan Layanan Umum	768,924,273	30,322,590	738,601,683	2,435.81
JUMLAH ASET LANCAR	1,723,628,795,671	1,563,810,153,465	159,818,642,206	10.21
ASET TETAP				
Tanah	14,677,800,582,743	12,669,599,948,704	2,008,200,634,039	15.85
Peralatan dan Mesin	9,931,624,671,639	8,890,264,258,306	1,041,360,413,333	11.71
Gedung dan Bangunan	6,990,892,130,747	4,701,888,493,303	2,289,003,637,444	48.68
Jalan, Irigasi dan Jaringan	31,688,821,624,773	25,599,764,194,232	6,089,057,430,541	23.78
Aset Tetap Lainnya	1,904,414,529,788	928,859,141,120	975,555,388,668	105.02
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9,879,614,271,189	8,576,843,274,297	1,302,770,996,892	15.18
Tanah Badan Layanan Umum	1,065,197,712,958	562,380,517,600	502,817,195,358	89.40
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	335,420,378,662	99,524,151,540	235,896,227,122	237.02
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	433,894,968,413	235,156,624,556	198,738,343,857	84.51
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	14,244,555,248	5,788,051,340	8,456,503,908	146.10
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	4,861,299,540	2,401,064,511	2,460,235,029	102.46
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	21,285,498,700	0	21,285,498,700	0.00
JUMLAH ASET TETAP	76,948,072,224,400	62,272,469,719,509	14,675,602,504,891	23.56
ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran	0	216,000,000	(216,000,000)	(100.00)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	489,841,857	564,990,854	(75,148,997)	(13.30)
Aset Tak Berwujud	1,174,669,428,410	904,864,016,296	269,805,412,114	29.81
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	15,999,395,216	937,453,000	15,061,942,216	1,606.68
Aset Lain-lain	144,219,272,102	24,930,120,555	119,289,151,547	478.49
JUMLAH ASET LAINNYA	1,335,377,937,585	931,512,580,705	403,865,356,880	43.35
JUMLAH ASET	80,007,078,957,656	64,767,792,453,679	15,239,286,503,977	23.52
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	139,725,858,192	8,944,418,112	130,781,440,080	1,462.15
Pendapatan Diterima di Muka	12,249,090	0	12,249,090	0.00

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
 Tanggal : 06/05/11
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2010	2009	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Uang Muka dari KPPN	854,093,528	905,181,222	(51,087,694)	(5.64)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	345,903,360,986	85,905,104,894	259,998,256,092	302.65
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	486,495,561,796	95,754,704,228	390,740,857,568	408.06
JUMLAH KEWAJIBAN	486,495,561,796	95,754,704,228	390,740,857,568	408.06
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	228,950,805,933	574,540,376,904	(345,589,570,971)	(60.15)
Cadangan Persediaan	1,051,477,759,601	865,608,291,112	185,869,468,489	21.47
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka	-139,693,536,754	-8,853,854,348	(130,839,682,406)	1,477.77
Dana Lancar BLU	93,038,372,556	36,760,635,569	56,277,736,987	153.09
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	3,372,081,629	0	3,372,081,629	0.00
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	-12,249,090	0	(12,249,090)	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	1,237,133,233,875	1,468,055,449,237	(230,922,215,362)	(15.72)
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	76,948,072,224,400	62,272,469,719,509	14,675,602,504,891	23.56
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	1,335,377,937,585	931,512,580,705	403,865,356,880	43.35
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	78,283,450,161,985	63,203,982,300,214	15,079,467,861,771	23.85
JUMLAH EKUITAS DANA	79,520,583,395,860	64,672,037,749,451	14,848,545,646,409	22.95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	80,007,078,957,656	64,767,792,453,679	15,239,286,503,977	23.52

JAKARTA, MEI 2011
 MENTERI PERHUBUNGAN



FREDDY NUMBERI

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2 KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010 – 2014

A. VISI

Visi Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 adalah **“Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”** *Pelayanan perhubungan yang handal*, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang aman

(*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Pelayanan perhubungan yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. *Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah* diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

B. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi dengan mengacu kepada tiga pendekatan, yaitu: Pertama, pemulihan kondisi sarana dan prasarana perhubungan agar berfungsi seperti pada masa sebelum krisis ekonomi; Kedua, melakukan konsolidasi dengan reorientasi dan reposisi peran dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam kerangka *good governance*; Ketiga, melaksanakan pembangunan dalam rangka *peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan* jasa perhubungan. Oleh karena itu misi Kementerian Perhubungan sesuai dengan tiga pendekatan tersebut adalah:

1. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan:

Sejak terjadi krisis ekonomi yang didahului dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, kinerja pelayanan jasa perhubungan semakin memburuk karena operator tidak mampu melakukan perawatan dan peremajaan armada, pemerintah hampir tidak memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat pengguna jasa tidak memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa perhubungan menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan.

2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan (*regulatory reform*) dan penegakan hukum secara konsisten:

Sesuai dengan prinsip *good governance* dipandang perlu melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, mengarahkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan perbantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa perhubungan.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan:

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan perdesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan:

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan, perbaikan pelayanan melalui penerapan teknologi transportasi sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa perhubungan senantiasa berpedoman kepada rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

C. TUJUAN

Pembangunan Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2010-2014 bertujuan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Dalam mewujudkan dukungan tersebut penyelenggaraan transportasi harus berjalan secara efektif dan efisien guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

D. SASARAN DAN PRIORITAS

1. SASARAN

Sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di perdesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan pemererat hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar wilayah akan mem-buka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperanserta dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
- b. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/*regulatory reform*) di bidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;
- d. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. PRIORITAS

Pembangunan perhubungan tahun 2010-2014, dititikberatkan kepada pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan pembangunan angkutan jalan, angkutan perkotaan, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;
- b. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program *Roadmap to Zero Accident*;
- c. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;
- d. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran: pengurangan *backlog* sarana dan prasarana perkeretaapian ; dan penambahan kapasitas terkait dengan peningkatan permintaan jasa transportasi;
- e. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;
- f. Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;

- g. Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;
- h. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global (*global warming*).

3. STRATEGI

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan, yaitu:

A. STRATEGI PEMULIHAN DAN PENATAAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Strategi ini diarahkan untuk melakukan pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan kembali ke posisi normal setelah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global. Pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan dibarengi dengan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan (*regulatory reform*), peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Perhubungan, dengan pemihakan kepada peranserta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan, serta mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (*owner*) menjadi regulator dan fasilitator.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN

Strategi Pembangunan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara. Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan berpedoman kepada 7 (tujuh) pilar sebagai berikut:

- 1. Pembangunan perhubungan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;

2. Pembangunan perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki daya guna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat;
3. Pembangunan perhubungan difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah;
4. Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*);
5. Pembangunan perhubungan dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (*market failure*);
6. Pembangunan perhubungan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan rasional;
7. Pembangunan Perhubungan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan transportasi, pelaksanaan fungsi penunjang (*servicing function*) dilakukan pada daerah yang telah berkembang dan maju. Kebijakan pelayanan pada daerah yang telah berkembang atau maju antara lain memberikan peluang bagi keterlibatan swasta untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip *least cost economy* terutama pada segmen usaha yang mampu mencapai *cost recovery*, sedangkan untuk segmen usaha yang tidak mampu mencapai *cost recovery*, pembangunan fasilitas pelayanan dilakukan oleh pemerintah. Untuk daerah terisolasi, terpencil, terbelakang dan kawasan perbatasan, pemerintah memberikan pelayanan transportasi melalui pelaksanaan fungsi pendorong (*promoting function*).

2. Pembangunan Perhubungan mendukung kebijakan otonomi daerah melalui penyediaan jasa perhubungan yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan daerah. Disamping itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk melakukan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian fasilitas perhubungan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pembangunan perhubungan mendukung kelancaran mobilitas, distribusi dan pembangunan terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sektor-sektor strategis lainnya, yang pada akhirnya turut menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan yang berkesinambungan.
4. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien.
5. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan reposisi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas SDM.
6. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien.
7. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan reposisi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas SDM.
8. Prinsip dasar kebijakan penetapan tarif jasa perhubungan terdiri dari 3 (tiga) aspek pertimbangan, yaitu:
 - a. Sisi Operator selaku Penyedia Jasa:
Pertimbangan finansial dengan pendekatan kepada faktor kelangsungan usaha dengan memperhitungkan biaya dari

- setiap jenis jasa perhubungan (*cost of service*) dan nilai jasa yang diproduksi dan penggunaan teknologi (*value of service*).
- b. Sisi Masyarakat selaku Pengguna Jasa:
Pertimbangan sosial ekonomi dengan pendekatan kepada daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan membayar (*ability to pay*) dan kemauan membayar (*willingness to pay*).
- c. Sisi Pemerintah selaku Regulator:
Pertimbangan kebijakan nasional dengan lebih menekankan kepada stabilitas nasional, namun tetap dengan memperhitungkan tercapainya keadaan "*optimum allocation resources*" dengan memperhatikan kriteria efisiensi dan kriteria pemerataan dalam pembangunan serta menjaga tingkat pelayanan (*level of service*) dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan jasa perhubungan.

PRIORITAS PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010

Sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di pedesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang, distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi pada tahun 2010 diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa

wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperanserta dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2010 adalah mewujudkan sasaran yang telah diformulasikan dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya keberkelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/ *regulatory reform*) dibidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2010, skenario pagu anggaran setiap program pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2010 disusun berdasarkan 8 (delapan) prioritas sebagai berikut :

1. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;
2. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program *Roadmap to Zero Accident*;
3. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;
4. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1

- (satu) tahun anggaran : pengurangan *backlog* sarana dan prasarana perkeretaapian; dan penambahan kapasitas terkait dengan peningkatan permintaan jasa transportasi;
5. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;
 6. Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;
 7. Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;
 8. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global (*global warming*).

Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi tahun 2010 adalah meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya tersebut antara lain meliputi :

1. Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi baik dikawasan perkotaan maupun daerah perbatasan, terisolir dan belum berkembang.
3. Penyediaan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas;
4. Melanjutkan reformasi peraturan perundangan agar dapat mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait;
5. Melakukan restrukturisasi kelembagaan terhadap penyelenggara transportasi baik ditingkat pusat maupun daerah;
6. Melakukan optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional, pemeliharaan, rehabilitasi maupun investasi melalui penyusunan prioritas program yang diwujudkan dalam suatu kegiatan.

Arah kebijakan masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

Arah kebijakan transportasi darat meliputi: (1) Peningkatan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya; (2) Meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai

pendukung moda transportasi lainnya; (3) Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; (4) Melanjutkan kegiatan operasional unit pelaksana teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya; (5) Meningkatkan keselamatan transportasi darat secara komprehensif dan terpadu; (6) Pengembangan transportasi darat berkelanjutan; (7) Pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota.

b. Transportasi Kereta Api

Arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2010 meliputi: (1) Penyiapan dan penguatan regulasi berupa penyelesaian peraturan perundangan serta penyusunan peraturan/pedoman pendukung lainnya termasuk regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator; (2) Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan termasuk untuk mewujudkan eksistensi Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian; (3) Meningkatkan kapasitas lintas dan kualitas pelayanan serta reaktivasi koridor-koridor yang sudah tidak dioperasikan; (4) Meningkatkan keselamatan angkutan melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian serta pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian; (5) Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM operator perkeretaapian; (6) Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian melalui perwujudan keterpaduan antar moda dan pengembangan KA perkotaan; (7) Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; (8) Meningkatkan SDM perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional.

c. Transportasi Laut

Arah kebijakan pembangunan transportasi laut tahun 2010 difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pembangunan sistem yang memperlancar dan mempermudah pelayanan serta peningkatan SDM dan pengembangan institusi sesuai amanat UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Membangun dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang memiliki *waiting time* tinggi; (2) Membangun kapal-kapal perintis bagi daerah yang membutuhkan; (3) Membangun pelabuhan-pelabuhan kecil yang disinggahi kapal perintis; (4) Membangun dan meningkatkan kualitas terminal penumpang,

terutama pada daerah tujuan wisata; (5) Membangun kapal patroli dan SBNP serta peralatan keselamatan lainnya; (6) Membangun sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian waktu; (7) Membangun sistem pelayanan dan pendidikan terpadu bagi pelaut, bekerja sama dengan Badan Diklat Perhubungan; (8) Membangun sistem pengadaan barang/jasa yang transparan dan bersih; (9) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; (10) Membentuk organisasi baru sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2008: Otoritas pelabuhan, Syahbandar, UPP dan *Sea and Coast Guard*; (11) Menerapkan sistem remunerasi baru; (12) Melimpahkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan *feeder* kepada pemerintah daerah.

d. Transportasi Udara

Arah kebijakan pembangunan transportasi udara adalah: (1) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO guna meningkatkan keselamatan penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara wilayah Indonesia; (2) Mengembangkan dan meningkatkan prasarana transportasi udara di daerah rawan bencana alam dan daerah perbatasan serta daerah potensi ekonomi; (3) Peningkatan dan pemulihan kembali fungsi sarana dan prasarana transportasi udara sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO; (4) Pengembangan sistem, regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; (5) Menciptakan perusahaan penerbangan nasional yang efisien, efektif, dan kompetitif dalam pasar internasional; (6) Menciptakan iklim usaha jasa angkutan udara dalam persaingan sehat dan kondusif sehingga mempunyai kelangsungan hidup jangka panjang.

e. Penunjang Transportasi

Pada tahun 2010 arah kebijakan penunjang transportasi di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi: (1) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penyiapan tugas pokok dan fungsi; (2) Memberikan kesempatan yang luas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di sektor transportasi; (3) Pengembangan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Perhubungan; (4) Reformasi dan restrukturisasi organisasi yang mampu mengantisipasi

perkembangan sektor transportasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; (5) Perencanaan dan penelaahan peraturan perundangan-undangan di bidang transportasi; (6) Koordinasi penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang transportasi; (7) Penyusunan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang transportasi; (8) Pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan perumusan perjanjian; (9) Pemberian bantuan hukum; (10) Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi; (11) Pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi; (12) Penyiapan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri; (13) Mewujudkan Pelayanan Umum yang Optimal yang antara lain meliputi : Terwujudnya pelayanan kepemimpinan dan keprotokolan yang handal dan dinamis; Terwujudnya pelayanan dan tertib administrasi yang sesuai dengan sistem dan prosedur; Terselenggaranya pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K3), sarana dan prasarana dengan baik; Terwujudnya pelayanan administrasi pembiayaan dan perjalanan dinas yang efektif dan efisien; Terselenggaranya peningkatan kesehatan pegawai yang memadai; (14) Mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan rencana dan sesuai peraturan berlaku; (15) Mengarahkan dan mendorong agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terjadi KKN; (16) Melaksanakan *Action Plan* (rencana tindak) Kementerian Perhubungan untuk mencapai opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (17) Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan *action plan*; (18) Melakukan klarifikasi terhadap hasil inventarisasi BMN oleh Tim Keppres 17; (19) Intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Departemen Perhubungan; (20) Mendorong UPT yang tingkat pelayanan kepada publik tinggi untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU); (21) Penatausahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan Kementerian Perhubungan; (22) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Anggaran yang tertib dan teratur termasuk evaluasi Pinjaman Hibah Luar Negeri; (23) Pengelola

Anggaran yang berkualitas; (24) Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan BMN; (25) Melaksanakan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi; (26) Perluasan jaringan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memperluas difusi informasi kebijakan Kementerian Perhubungan melalui media radio, televisi dan media cetak dengan memanfaatkan teknologi internet akan pengembangan komunikasi interaktif lewat internet; (27) Pengembangan dan penyebaran informasi dan komunikasi secara terpadu melalui satu pintu yang mengintegrasikan masukan-masukan dari bagian Humas di setiap Direktorat Jenderal; (28) Pengembangan / peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara professional dengan melaksanakan Diklat bidang infokom yang professional dan pemanfaatan program, diklat dalam dan luar negeri bidang informasi; (29) Peningkatan sarana dan prasarana operasional infokom, melalui pengadaan sarana dan prasarana infokom sesuai perkembangan teknologi informasi. Upaya peningkatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan pula pengembangan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan; (30) Penyusunan standard kerja baku sebagai sarana pengendalian dan jaminan atas mutu penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi; (31) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan melalui peningkatan kerjasama dalam penyebaran informasi dan peningkatan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat; (32) Peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga /unsur pers dan kelompok organisasi masyarakat. Upaya peningkatan ini dilakukan dengan melaksanakan jumpa pers dan liputan pers secara berkala serta peningkatan kualitas pemberitaan lewat media pers. Disamping itu juga perlu dilakukan pemanfaatan / pemberdayaan kelompok atau organisasi masyarakat dalam penyebaran informasi (kelompok informasi masyarakat, *media watch*); (33) Mengintegrasikan sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; (34) Menstandarisasi data dan mekanisme pertukaran data di lingkungan Kementerian Perhubungan; (35) Menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) di lingkungan Kementerian Perhubungan; (36) Melakukan pengembangan aplikasi dengan menyesuaikan kebutuhan pengolahan dan penyajian data dan informasi.

PENDAPATAN

Pendapatan

Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2010 (*Audited*) **netto** sebesar Rp. 917.409.760.257,- atau 116,25 persen diatas Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2010 sebesar Rp. 790.021.618.357,-. dibandingkan Tahun 2009 (*Audited*) Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2010 (*Audited*) mengalami kenaikan sebesar Rp. 54.908.089.422,- atau 6,37 persen. Realisasi PNBP pada Kementerian Perhubungan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan BLU.

BELANJA

Belanja

Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan gabungan (DIPA Umum dan BLU) Tahun 2010 (*Audited*) **netto** setelah dikurangi pengembalian belanja menjadi Rp 15.562.079.341.934,- atau 86,96 persen dari pagu anggaran Rp.17.895.554.907.000,- (Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah).

Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.

Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belaja Modal Kementerian Perhubungan Tahun 2010 (*Audited*) dan Tahun 2009 (*Audited*)

Nb	Uraian	Tahun 2010 (<i>Audited</i>)	Tahun 2009 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/Perurunan
1.	Belanja Pegawai	1.158.162.941.133	1.076.444.380.431	81.718.560.702
2.	Belanja Barang	2.697.631.286.391	2.199.997.557.246	497.633.729.145
3.	Belanja Modal	11.706.285.114.410	12.274.472.450.052	(568.187.335.642)
	Jumlah	15.562.079.341.934	15.550.914.387.729	11.164.954.205

Realisasi belanja berdasarkan program yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan :

Tabel 2.
Realisasi Belanja Berdasarkan Program Kementerian Perhubungan Tahun 2010

Kode	Program	Anggaran setelah Revisi	Realisasi	%
109	Program Penerapan Kepemerintahan yang baik	2.005.930.025.000	1.770.339.159.423	88,26
110	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	39.027.500.000	34.264.749.571	87,80
113	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	199.311.000.000	128.629.545.658	64,54
117	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	78.450.800.000	73.478.275.386	93,68
003	Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias	183.307.100.000	174.982.650.767	93,66
803	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	391.703.300.000	357.183.851.599	91,19
804	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	121.439.000.000	116.724.363.631	96,12
805	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	32.395.000.000	31.854.152.900	98,33
806	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian	200.046.319.000	308.487.926.633	154,21
807	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta api	3.586.562.013.000	2.986.229.857.228	83,26
808	Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kereta Api	40.718.900.000	40.499.419.918	99,46
809	Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian	43.880.600.000	41.490.934.343	94,55
810	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ	66.474.700.000	62.752.863.566	94,40
811	Program Pembangunan Transportasi Laut	2.835.938.798.000	2.357.781.105.485	83,14
812	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut	158.615.000.000	150.117.487.576	94,64
813	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut	613.070.058.000	536.643.016.308	87,53

814	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	996.980.400.000	941.903.370.228	94,48
815	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	43.455.200.000	40.219.862.700	92,55
816	Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan ASDP	24.755.600.000	24.080.895.230	97,27
817	Program Pembangunan Transportasi Udara	3.244.212.774.000	2.937.594.076.853	90,55
818	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara	245.951.150.000	239.574.323.080	97,41
819	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara	393.609.770.000	237.819.220.863	60,42
820	Program Pengembangan Transportasi antar Moda	69.900.800.000	62.346.414.182	89,19
821	Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	56.577.200.000	55.532.196.876	98,15
601	Program Pendidikan Tinggi	2.223.241.900.000	1.851.549.621.930	83,28
	Jumlah	17.895.554.907.000	15.562.079.341.934	86,96

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Daftar entitas pelaporan keuangan tingkat Unit Eselon I

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2010 (*Audited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Unit Eselon I beserta jenjang struktural di bawahnya seperti kantor/satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2010 (*Audited*) disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan Unit Eselon I (UAPPA-EI) dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.

Pada Tahun Anggaran 2010, Kementerian Perhubungan (UAPA) bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian laporan keuangan dari 8 (delapan) Unit Eselon I (UAPPA-E1), yaitu:

1. Sekretariat Jenderal sebanyak 18 kantor/satuan kerja
2. Inspektorat Jenderal sebanyak 1 kantor/satuan kerja
3. Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 82 kantor/satuan kerja
4. Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 355 kantor/satuan kerja
5. Ditjen Perhubungan Udara sebanyak 166 kantor/satuan kerja
6. Ditjen Perkeretaapian sebanyak 25 kantor/satuan kerja
7. Badan Litbang Perhubungan sebanyak 5 kantor/satuan kerja
8. Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebanyak 24 kantor/satuan kerja

Kantor/Satuan Kerja tersebut terdiri dari 676 Kantor/satuan kerja pusat dan daerah .

Di dalam DIPA Umum Kementerian Perhubungan termasuk DIPA yang bersumber dari BLU sebesar Rp 112.315.412.000 terdapat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan yaitu STIP, BP3IP, PIP Semarang, dan PIP Makasar dan BPPTD Tegal.

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Rincian Anggaran Satker BLU

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	JENIS SUMBER DANA	
		APBN	BLU
2009	3	84.443.597.000	53.891.844.000
2010	5	356.615.668.000	112.315.412.000

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Perhubungan adalah 676 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 676 satker (100%), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sejumlah 0 satker (0%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1

No	Kode Es. I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan										Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP		UB			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	01	Setjen	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
2	02	Itjen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	03	Ditjen Hubdat	16	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	82
4	04	Ditjen Hubla	57	-	298	-	-	-	-	-	-	-	-	355
5	05	Ditjen Hubud	11	-	155	-	-	-	-	-	-	-	-	166
6	08	Ditjen KA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
7	11	Badan Litbang	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
8	12	Badan Peng. SDM	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Jumlah			157	-	519	-	-	-	-	-	-	-	-	676

Keterangan: M = Menyampaikan LK TM = Tidak menyampaikan LK

Selain mengelola Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (022), Kementerian Perhubungan juga mengelola Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp 1.296.898.661.000,- yang terdapat pada 3 (tiga) UAPPAE-1 terdiri dari :

1. Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 600.000.000.000,- untuk kegiatan PSO PT. Pelni (Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Laut).
2. Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 535.000.000.000,- untuk kegiatan PSO PT. Kereta Api Indonesia (Satker Direktorat Jenderal Perkeretaapian).
3. Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp. 161.898.661.000,- berupa Bea Masuk Yang Ditanggung Pemerintah (Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Udara).

LK Kementerian Perhubungan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Kementerian Negara/Lembaga membukukan melalui SAI baik untuk transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan maupun belanja.

Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi Unit Eselon I. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja, dan Pembiayaan. Angka yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 (*Audited*) berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh KPPN.

2. Neraca

Neraca Kementerian Perhubungan Tahun 2010 (*Audited*) disusun berdasarkan kompilasi Neraca Unit Eselon I. Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya didasarkan pada Neraca Unit Eselon I. Neraca Kementerian Perhubungan Tahun 2010 (*Audited*) disusun melalui Sistem Akuntansi Instansi.

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Implementasi SAI pada Kementerian Perhubungan mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2009 dan 2008 Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang telah diperiksa oleh BPK-RI telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), yang pada tahun 2007 dan 2006 BPK-RI Tidak Mengeluarkan Pendapat (*Disclaimer Opinion*). Selain hal tersebut seluruh kantor/satuan kerja di bawah Unit Eselon I telah menyelenggarakan SAI dalam menyusun laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan terutama organisasi (kelembagaan), khususnya UAPPA-W yang telah dibentuk oleh Unit Eselon I masih belum optimal, dan kualitas sumber daya manusia yang memahami pelaporan keuangan pada masing-masing unit akuntansi masih kurang, walaupun sudah ada kemajuan yang signifikan.

Permasalahan lain yang cukup berpengaruh dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada masing-masing kantor/satker masih belum berjalan optimal dan sistem aplikasi masih belum sempurna. Selain itu, pada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan baru selesai melakukan inventarisasi fisik dan revaluasi atas nilai barang milik kekayaan negara yang dilaksanakan oleh Tim Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 yang dilanjutkan oleh Tim Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 khususnya pada Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) sehingga belum bisa disajikan dalam neraca Kementerian Perhubungan karena belum direkam pada SIMAK BMN. Hal ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas nilai aset yang disajikan di Neraca Kementerian Perhubungan.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2010 adalah 676 satker. Dari jumlah tersebut satker yang telah menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 676 satker (100%), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan barang sejumlah 0 satker (0%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Rekapitulasi Jumlah Satker menurut Eselon I

No	Kode Es. I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan										Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP		UB			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	01	Setjen	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
2	02	Itjen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	03	Ditjen Hubdat	16	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	82
4	04	Ditjen Hubla	57	-	298	-	-	-	-	-	-	-	-	355
5	05	Ditjen Hubud	11	-	155	-	-	-	-	-	-	-	-	166
6	08	Ditjen KA	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
7	11	Badan Litbang	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
8	12	Badan Peng SDM	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Jumlah			157	-	519	-	-	-	-	-	-	-	-	676

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian Perhubungan adalah :

(1) Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi **)

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang

dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/ BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/ Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya,

Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita

oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat

atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Hibah Kementerian Perhubungan **netto** Tahun 2010 (*Audited*) adalah sebesar Rp 917.409.760.257,- setelah dikurangi pengembalian sebesar Rp. 1.009.128.600,-

Pengembalian sebesar Rp. 1.009.128.600,- merupakan pengembalian pendapatan dari saldo awal dana lancar BLU karena realisasi pendapatan melebihi estimasi pendapatan yang ditetapkan dalam DIPA 2009.

Belanja Kementerian Perhubungan dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja Kementerian Perhubungan meliputi (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang, (iii) Belanja Modal.

Pada Tahun 2010 Kementerian Perhubungan (BA 022) mendapat alokasi dana yang bersumber dari DIPA Umum dan DIPA BLU. Untuk satker BLU pada tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kantor/Satker yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan dan telah beroperasi sebagai satker BLU yaitu :
 - Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 26/KMK.05/2009 tanggal 5 Pebruari 2009
 - Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 07/KMK.05/2009 tanggal 19 Januari 2009;
 - Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 509/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009
 - Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009
 - Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Tegal dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 285/KMK.05/2010 tanggal 12 Juli 2010.
- Pada bulan Desember telah disetujui 1 kantor sebagai satker BLU yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 486/KMK.05/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011.
- Masih dalam proses menjadi BLU yaitu Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya.

Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan gabungan (DIPA Umum dan DIPA BLU) **netto** Tahun 2010 (Audited) setelah dikurangi Pengembalian Belanja adalah sebesar Rp. 15.562.079.341.934,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.158.162.941.133,-, Belanja Barang sebesar Rp. 2.697.631.286.391,-, dan Belanja Modal sebesar Rp. 11.706.285.114.410,-.

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan **netto** Tahun 2010 (Audited) disajikan dalam tabel 6:

Tabel 6
Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan
netto Tahun 2010 (Audited)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	Rp 790.021.618.357	Rp 917.409.760.257	116,12%
	-Penerimaan Pajak	Rp -	Rp -	
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 790.021.618.357	Rp 917.409.760.257	116,12%
	-Penrimaan hibah	Rp -	Rp -	
2	Realisasi Belanja Negara	Rp 17.895.554.907.000	Rp 15.562.079.341.934	86,96%
	- Belanja Rupiah Murni	Rp 15.520.880.354.000	Rp 14.215.723.543.794	91,59%
	- Belanja Pinjaman LN	Rp 1.664.325.802.000	Rp 979.216.495.869	58,84%
	- Belanja Rupiah Pendamping	Rp 58.036.374.000	Rp 49.338.903.515	85,01%
	- Belanja Hibah	Rp 180.935.554.000	Rp 21.729.719.600	12,01%
	- Belanja PNPB	Rp 359.061.411.000	Rp 209.092.775.688	58,23%
	- Belanja BLU	Rp 112.315.412.000	Rp 86.977.903.468	77,44%

Rincian realisasi belanja Kementerian Perhubungan yang sumber dananya berasal dari DIPA Umum periode Tahun 2010 (Audited) adalah sebesar Rp.15.475.101.438.466,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.158.162.941.133,-, Belanja Barang sebesar Rp. 2.613.082.854.373,-, dan Belanja Modal sebesar Rp. 11.703.855.642.960,-.

Rincian realisasi Belanja Kementerian Perhubungan yang sumber dananya berasal dari DIPA BLU periode Tahun 2010 (Audited) adalah sebesar Rp.86.977.903.468,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.0,-, Belanja Barang sebesar Rp. 84.548.432.018,-, dan Belanja Modal sebesar Rp.2.429.471.450 ,-

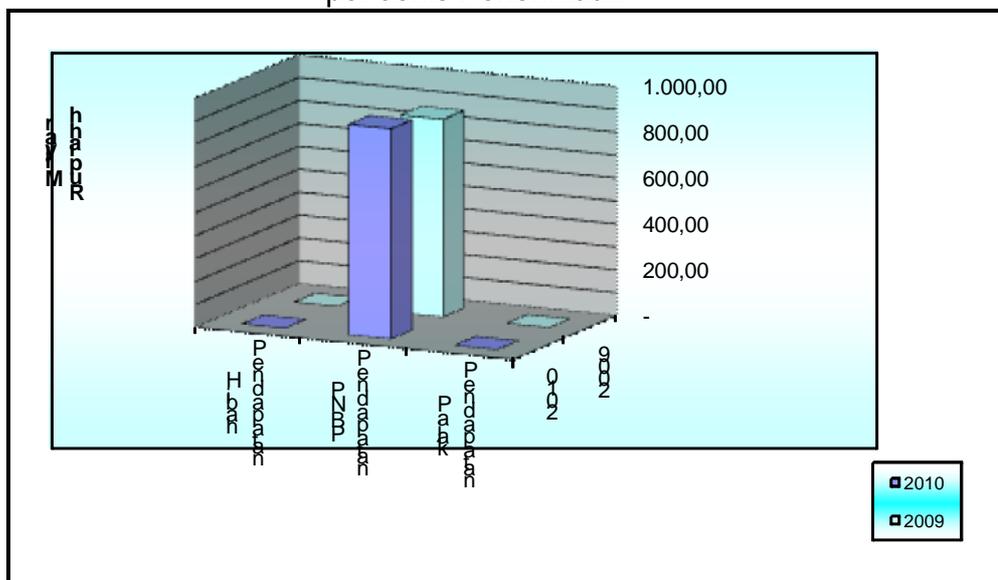
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah Rp
917,409
Milyar

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah **netto** Tahun 2010 (Audited) adalah sebesar Rp. 917.409.760.257,- atau 116,12 persen diatas estimasi yang ditetapkan Rp. 790.021.618.357,-. Estimasi pendapatan sebesar Rp. 790.021.618.357,- diperoleh berdasarkan penginputan estimasi pendapatan dalam DIPA masing-masing Kantor yang digabungkan oleh Eselon I selanjutnya menjadi estimasi pendapatan Kementerian. Dibandingkan dengan Tahun 2009 (Audited) realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp. 54.908.089.422,- atau 6.37 persen.

Grafik 1
Realisasi Pendapatan Tahun 2010 (Audited) dan Tahun 2009 (Audited)
per Jenis Penerimaan



B.2.1.2.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi
PNBP Rp
917,409
Milyar

Realisasi PNBP **netto** Tahun 2010 (Audited) sebesar Rp. 917.409.760.257,- atau 116,12 persen diatas Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2010 sebesar Rp. 790.021.618.357,-. Dibandingkan Tahun 2009 (Audited) realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2010 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp. Rp. 54.908.089.422,- atau 6.37 persen. Realisasi PNBP pada Kementerian Perhubungan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan BLU.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) **netto** Tahun 2010 (Audited) dan 2009 (Audited) menurut Tingkat Eselon 1 dapat dirinci dalam tabel 7 :

Tabel 7
 Realisasi PNBP **netto** Tahun 2010 (Audited) dan 2009 (Audited) menurut
 Tingkat Eselon 1

(dalam Rupiah)

Uraian	2010 (Audited)	2009 (Audited)
Sekretariat Jenderal	371.487.268,-	712.505.875,-
Ditjen Perhubungan Darat	9.966.556.858,-	5.218.013.738,-
Ditjen Perhubungan Laut	478.453.130.843,-	505.658.469.484,-
Ditjen Perhubungan Udara	293.171.987.629,-	233.439.220.563,-
Ditjen Perkeretaapian	2.587.611.881,-	5.347.176.765,-
Badan Litbang Perhubungan	39.887.162,-	140.966.726,-
Badan Pengemb. SDM Perhubungan	132.819.098.616,-	111.957.972.516,-
Badan SAR Nasional	0,-	27.345.168,-
Jumlah	917.409.760.257,-	862.501.670.835,-

B.2.1.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi

PNBP Lainnya

Rp 795,361

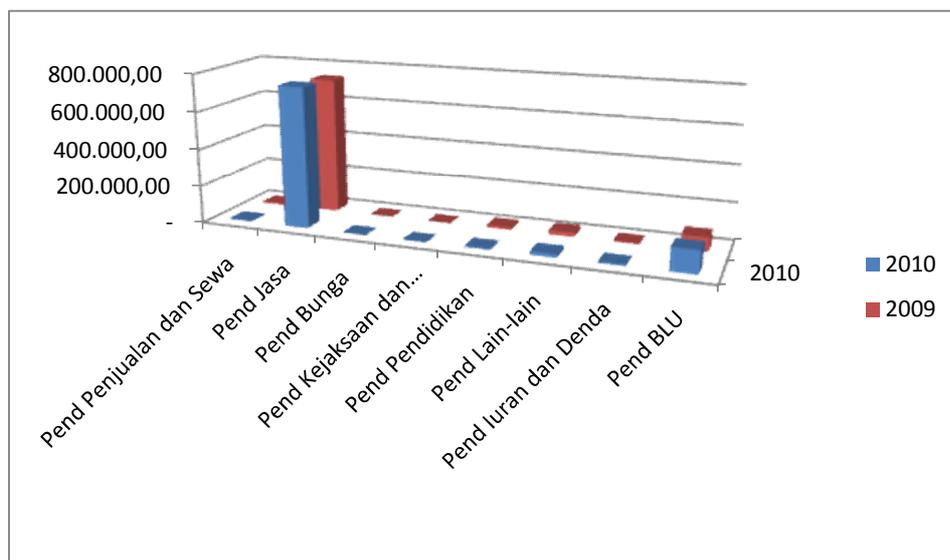
Milyar

Realisasi PNBP **netto** Tahun 2010 (Audited) sebesar Rp. 795.361.678.701,- atau 115.34 persen diatas Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2010 sebesar Rp. 689.638.606.000,-. Dibandingkan Tahun 2009 (Audited) Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2010 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp 10.534.33.667,- atau 1.34 persen.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya Tahun 2010 (Audited) dan 2009 (Audited) menurut jenisnya dapat dirinci dalam Grafik 2 :

Grafik 2

Realisasi PNBP Tahun 2010 (Audited) dan 2009 (Audited) Menurut jenisnya (dalam milyar rupiah)



B.2.1.2.3. Pendapatan BLU

Realisasi
Pendapatan
BLU Rp
122,048
milyar

Realisasi Pendapatan BLU **netto** Tahun 2010 (Audited) sebesar Rp. 122.048.081.556,- atau 121.49 persen diatas Estimasi Pendapatan BLU Tahun 2010 sebesar Rp. 100.383.012.357,-. Dibandingkan Tahun 2009 (Audited) Pendapatan BLU Tahun 2010 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp. 44.373.715.755,- atau 57.13 persen.

Rincian Realisasi Pendapatan BLU dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 8
Realisasi Pendapatan BLU 2010
(dalam Rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pend. Jasa Layanan Umum	Rp 100.383.012.357	Rp 117.442.008.785	116,99
Pend. Hibah BLU	Rp -	Rp 287.690.005	100,00
Pend. Hasil Kerja Sama BLU	Rp -	Rp 2.933.529.675	100,00
Pend. BLU Lainnya	Rp -	Rp 1.384.853.091	100,00
Jumlah	Rp 100.383.012.357	Rp 122.048.081.556	121,58

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU 2010 dan 2009(dalam Rupiah)

Uraian	2010	2009	Kenaikan/Penurunan	%
Pend. Jasa Layanan Umum	Rp 117.442.008.785	Rp 77.674.365.801	Rp 39.767.642.984	51,20
Pend. Hibah BLU	Rp 287.690.005		Rp -	100,00
Pend. Hasil Kerja Sama BLU	Rp 2.933.529.675		Rp -	100,00
Pend. BLU Lainnya	Rp 1.384.853.091		Rp -	100,00
Jumlah	Rp 122.048.081.556	Rp 77.674.365.801	Rp 39.767.642.984	51,20

Tabel 10
Realisasi Pendapatan BLU 2010 Berdasarkan Satker
(dalam Rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
BP3IP JAKARTA	Rp 30.282.650.000	Rp 38.610.545.518	127,50
STIP JAKARTA	Rp 49.090.498.357	Rp 51.303.256.798	104,51
PIP SEMARANG	Rp -	Rp 8.616.182.840	100,00
PIP MAKASSAR	Rp 21.009.864.000	Rp 23.518.096.400	111,94
Jumlah	Rp 100.383.012.357	Rp 122.048.081.556	121,58

Estimasi pendapatan sejumlah Rp. 100.383.012.357,- tidak memperhitungkan PIP Semarang dan BP2TD Tegal karena dokumen sumber pada kedua satker tersebut yaitu DIPA BLU untuk estimasi pendapatan belum direvisi menjadi estimasi pendapatan BLU.

B.2.2. Belanja Negara

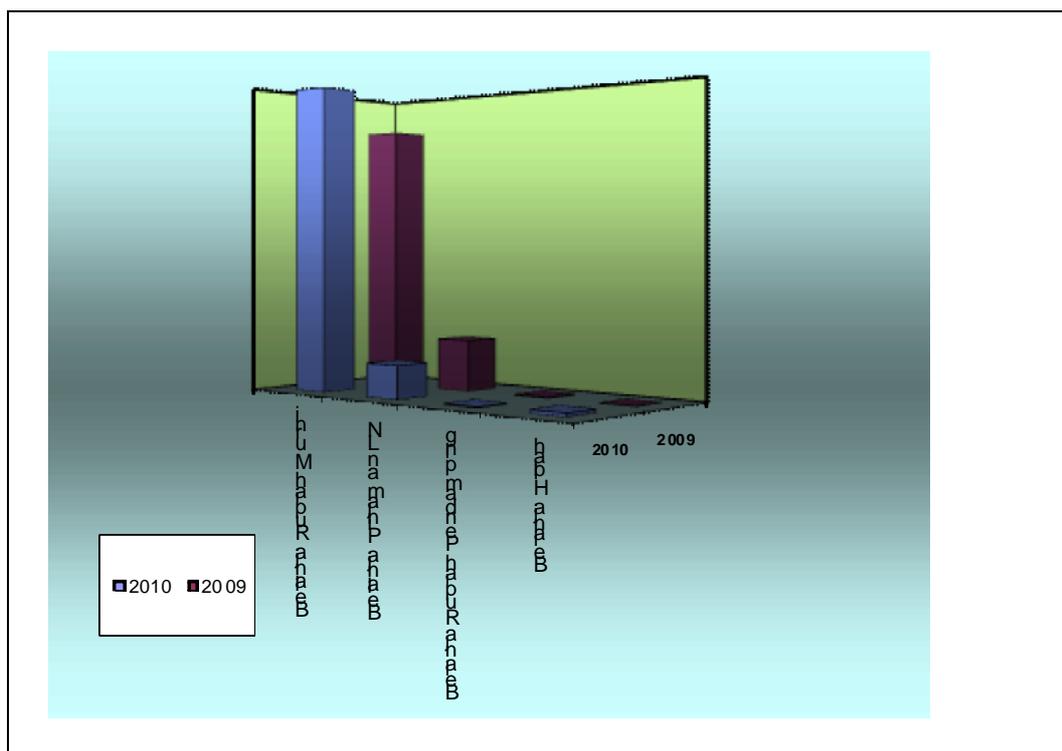
Realisasi
Belanja
Negara
Rp15,562
Triliun

Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan gabungan (DIPA Umum dan BLU) *netto* Tahun 2010 (Audited) setelah dikurangi pengembalian belanja menjadi Rp.15.562.079.341.934,- atau 86,96 persen dari pagu anggaran Rp. 17.895.554.907.000,- (Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah).

Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri (iii) Belanja Hibah (iv) Rupiah Murni Pendamping (v) Penerimaan Negara Bukan Pajak (vi) Badan Layanan Umum.

Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik 3:

Grafik 3
Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 (Audited) dan 2009 (Audited)



Realisasi Belanja *netto* Tahun 2010 (Audited) dan 2009 (Audited) menurut Tingkat Eselon 1 dapat dirinci dalam Tabel 11 :

Realisasi
Belanja Rp 15,
562 Triliun

Tabel 11
Realisasi Belanja **netto** Tahun 2010 (Audited) dan 2009 (Audited) *netto*
menurut
Tingkat Eselon 1

Uraian	2010 (Audited)	2009 (Audited)
Sekretariat Jenderal	287.101.614.682	287.361.600.966
Inspektorat Jenderal	56.495.756.314	45.882.684.386
Ditjen Perhubungan Darat	1.720.361.328.200	1.656.755.994.712
Ditjen Perhubungan Laut	3.955.969.420.676	3.988.211.120.870
Ditjen Perhubungan Udara	3.943.108.219.881	4.270.277.620.350
Ditjen Perkeretaapian	3.416.966.124.064	3.411.733.773.662
Badan Litbang Perhubungan	81.081.638.938	57.876.384.443
Badan Diklat Perhubungan	2.100.995.239.179	1.282.758.708.369
Badan SAR Nasional	0	550.056.499.971
Jumlah	15.562.079.341.934	15.550.914.387.729

B.2.2.1. Belanja

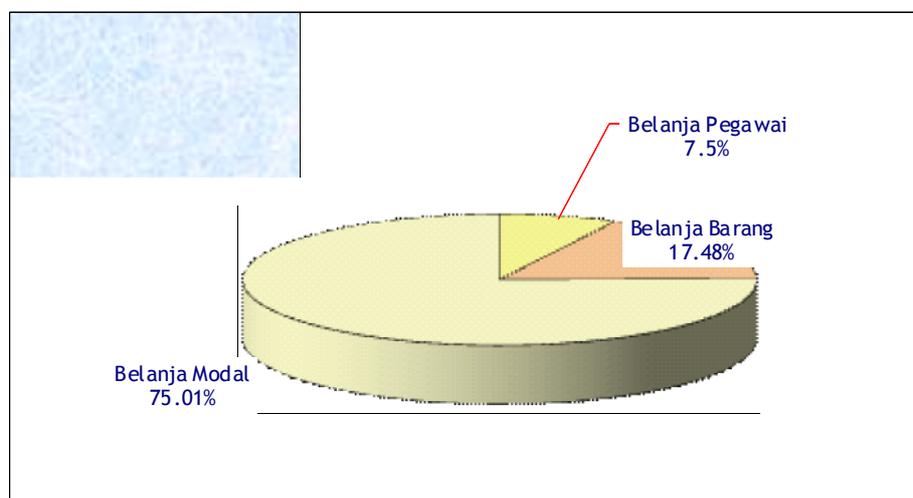
Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan gabungan (DIPA Umum dan BLU) **netto** Tahun 2010 (Audited) setelah dikurangi pengembalian belanja menjadi Rp. 15.562.079.341.934,- atau 86,96 persen dari pagu anggaran Rp. 17.895.554.907.000,- (Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah).

Realisasi belanja bruto sebesar Rp. 15.569.868.645.486,- terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 7.789.303.552,- sehingga realisasi netto sebesar Rp.15.562.079.341.934,- terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Komposisi realisasi Belanja **netto** menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:

Grafik 4
Komposisi Realisasi Belanja **netto** menurut Jenis Belanja TA 2010

Belanja
Pemerintah
Pusat menurut
Jenis Belanja



Belanja
Pegawai Rp 1,
159 Triliun

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai **brutto** Kementerian Perhubungan Tahun 2010 (Audited) adalah sebesar Rp 1.159.040.976.744,- atau 90.59 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1.279.373.663.000,- (Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Hibah dan PNBPN).

Pada Tahun 2009 terdapat realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.077.105.910.063,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 81.935.066.681,-.

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2010 (Audited) dan 2009 (Audited)

Uraian	31-Des-10	31-Des-09	% naik/ (turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 1.087.981.244.968	Rp 1.019.822.341.153	6,68
Belanja Honorarium	Rp 34.902.353.250	Rp 41.351.236.610	(15,60)
Belanja Lembur	Rp 26.762.514.500	Rp 9.553.144.750	180,14
Belanja Vakasi	Rp 9.394.864.026	Rp 6.003.016.250	56,50
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	Rp -	Rp 376.171.300	(100,00)
Total	Rp 1.159.040.976.744	Rp 1.077.105.910.063	7,61

Terdapat pengembalian belanja pegawai pada tahun 2010 (Audited) dan Tahun 2009 (Audited) sebesar Rp 878.035.611,- dan Rp. 661.529.632,-

Belanja
Barang Rp
2,699 Triliun

B.2.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang **brutto** Kementerian Perhubungan Tahun 2010 (Audited) adalah sebesar Rp. 2.699.193.858.094,- atau 84.24 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.204.024.553.000 (Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Hibah, PNBPN dan BLU).

Pada Tahun 2009 terdapat realisasi belanja barang sebesar Rp 2.200.568.414.009,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp498.625.444.085,-. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2010 (Audited) dan 2009 (Audited)

Uraian	31-Des-10	31-Des-09	% naik/ (turun)
Belanja Barang Operasional	Rp 341.925.331.896	Rp 403.248.507.797	-15,21
Belanja Barang Non Operasional	Rp 1.097.322.916.610	Rp 801.072.128.358	36,98
Belanja Jasa	Rp 133.102.260.863	Rp 131.151.411.407	1,49
Belanja Pemeliharaan	Rp 650.012.543.815	Rp 496.432.731.012	30,94
Belanja Perjalanan	Rp 392.282.372.892	Rp 329.016.725.203	19,23
Belanja Barang BLU	Rp 84.548.432.018	Rp 39.646.910.232	113,25
Jumlah	Rp 2.699.193.858.094	Rp 2.200.568.414.009	22,66

Terdapat pengembalian belanja barang pada tahun 2010 (*Audited*) dan Tahun 2009 (*Audited*) sebesar Rp 1.562.571.703,- dan Rp. 570.856.763,-

B.2.2.1.3 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp 11.706
Triliun

Realisasi Belanja Modal **brutto** Kementerian Perhubungan Tahun 2010 (*Audited*) adalah sebesar Rp. 11.711.633.810.648,- atau 87,28 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 13.412.156.691.000,- (Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Hibah, PNBPN dan BLU).

Pada Tahun 2009 terdapat realisasi belanja Modal sebesar Rp 12.275.388.659.342,- sehingga terdapat penurunan sebesar Rp 563.754.848.694,-.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2010 (*Audited*) dan 2009 (*Audited*)

Uraian	31-Des-10	31-Des-09	% naik/(tur un)
Belanja Modal Tanah	Rp 90.084.307.875	Rp 154.433.088.464	(41,67)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 3.261.326.085.535	Rp 2.636.146.027.989	23,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 1.928.498.293.552	Rp 1.556.741.050.846	23,88
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 5.920.938.233.171	Rp 7.539.072.507.626	(21,46)
Belanja Modal Fisik Lainnya	Rp 508.357.419.065	Rp 387.729.164.417	31,11
Belanja Modal BLU	Rp 2.429.471.450	Rp 1.266.820.000	91,78
Jumlah	Rp 11.711.633.810.648	Rp 12.275.388.659.342	(4,59)

Terdapat pengembalian belanja modal pada tahun 2010 (*Audited*) dan Tahun 2009 (*Audited*) sebesar Rp 5.348.696.238,- dan Rp. 916.209.290,-

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. HIBAH

Hibah langsung pada Kementerian Perhubungan terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara sebagai berikut :

a. Ditjen Perhubungan Darat

NO	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	REALISASI		KETERANGAN
				RUPIAH	VALAS	
1	Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan	Perancis (SNCF)	Integrated Public Transportation Masterplan for Bandung Metropolitan Area (BMA)			Selesai Tahun 2010, namun belum ada BAST karena masih proses pengecekan. Hibah dalam bentuk barang.
2	Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan	Jerman (GTZ)	Sustainable Urban Transportation Improvement Project (SUTIP)			Posisi <i>On Going Project</i> . Hibah dalam bentuk barang.
3	Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan	Jepang (JICA)	Jabodetabek Public Transportation Policy Implementation Strategy			Posisi <i>On Going Project</i> . Hibah dalam bentuk barang.

b. Ditjen Perhubungan Laut

NO	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	REALISASI		KETERANGAN
				RUPIAH	VALAS	
1	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Multi Negara (Aids to Navigation Fund)	Bantuan pemeliharaan dan penggantian peralatan kenavigasian Indonesia di Selat Malaka (Maintenance & Replacement of Aids to Navigation in the Strait of Malacca)	21.729.719.600,-		Register 70878801 Sudah disahkan DJPU. Hibah dalam bentuk kas.
2	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Jepang	Vessel Traffic System (VTS) Selat Malaka		¥ 222.697.000 ¥406.089.000	Register 70991901 Yang sudah mendapat pengesahan DJPU senilai ¥ 222.697.000 Untuk ¥406.089.000 Belum mendapat pengesahan DJPU karena Invoice belum diterima dari negara donor. Hibah dalam bentuk barang.

c. Ditjen Perhubungan Udara

No	NAMA SATKER	NEGARA	KEGIATAN	REALISASI		KETERANGAN
				RUPIAH	VALAS	
1	Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	Jepang (JICA)	Project for Strengthening Capacity on Ensuring Safe and Efficient Aircraft Operation			Register hibah 70671901. Data tidak diperoleh dari donor. Hibah dalam bentuk jasa (tenaga ahli)
2	Direktorat Keamanan Penerbangan	Belanda (ORET)	Procurement of ARFF Equipment Belanda (Grant)		€ 3.300.536,90	Register (hibah) 71118801 dan register (loan) 40101901. Pengadaan dan pengiriman 30 unit PKP-PK di 29 Bandara (Hibah 40%, loan 60%). Telah disampaikan surat Direktur Keamanan Penerbangan nomor AU/1316/DKP.171/III/2011 tanggal 19 Februari 2011 tentang Status the Procurement and Delivery of 30 Unit Airport Rescue and Fire Fighting Vehicles kepada Kabag Penyelesaian Transaksi Pinjaman Luar Negeri Bank Indonesia sebagai bahan kelengkapan administrasi untuk penerbitan SP3. Hibah dalam bentuk barang.
	Direktorat Keamanan Penerbangan	Belanda (INK BANK)	Procurement of ARFF Equipment Belanda (Loan)			
3	Direktorat Navigasi Penerbangan	Jepang (JICA)	Project for Improvement Aviation Safety Policy (Hibah)			Register 71043301. Hibah dalam bentuk jasa (tenaga ahli). Data tidak diperoleh dari donor
4	Direktorat Navigasi Penerbangan	USA (USTDA)	Restructuring and Regulatory Reform for Civil Aviation Authority Project			Register 70923301. Kontrak baru ditandatangani pada akhir September 2010. Dalam tahap pengumpulan data-data terkait studi dimaksud. Hibah dalam bentuk jasa (tenaga ahli)
5	Direktorat Navigasi Penerbangan	Jepang (JICA)	Airport Security System Improvement			Register 71287101. Hibah dalam bentuk jasa (tenaga ahli)
6	Direktorat Keamanan Penerbangan	Australia (AusAID)	Assistance for Security at Denpasar Airport			Merupakan kerjasama keamanan penerbangan antara Ditjen Hubud dengan Pemerintah Australia dengan Bandara Ngurah Rai sebagai percontohan. Kerjasama disepakati pada bulan Oktober 2009 dan dimulai pada Januari 2010 sampai dengan Juni 2011. Hibah dalam bentuk jasa (tenaga ahli). Data tidak diperoleh dari donor.

Kesulitan dalam pelaporan dan pengungkapan hibah khususnya hibah langsung terutama karena pihak donor hanya menyampaikan laporan tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan dan tidak pernah melaporkan aspek realisasi keuangan khususnya kepada Satker terkait dan umumnya merupakan pembayaran langsung dari donor kepada konsultan/expert.

2. PENDAPATAN DAN KAS DILUAR MEKANISME APBN

Secara teknis, untuk memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan diklat, Satker-satker di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan baik Satker BLU maupun Non BLU telah didukung oleh dana yang disediakan oleh APBN. Namun hal tersebut belum dapat memenuhi batas minimal anggaran yang diperlukan dan belum sepenuhnya dapat mendukung kebutuhan Badan Pengembangan SDM Perhubungan di dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 tahun 2005. Hal ini dikarenakan Badan Pengembangan SDM diharapkan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta diklat serta telah merekrut tenaga Pengajar dari para profesional yang sarat dengan pengalaman di bidang transportasi dengan kualifikasi yang sarat dengan pengalaman di bidang transportasi, kualifikasi pendidikan yang sesuai serta memiliki keunggulan kompetitif dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Biaya untuk tenaga pengajar tidak dapat disamakan dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; (2) Mekanisme PNBP dengan menggunakan MP tidak bisa dilaksanakan karena kurang efektif; dan, (3) Program diklat yang dilaksanakan harus sesuai dengan Standar Internasional seperti IMO, ICAO, dan sebagainya.

Untuk itu masih diperlukan kontribusi dari masyarakat agar pelayanan pelaksanaan kegiatan diklat dapat terselenggara sesuai dengan standar yang diharapkan. Namun kendala anggaran kiranya telah menjadi permasalahan klasik. Di satu sisi Badan Pengembangan SDM Perhubungan secara institusional dituntut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan orientasi kinerja yang tidak mementingkan mencari keuntungan, di sisi lain untuk menutupi kebutuhan operasionalnya Badan Pengembangan SDM Perhubungan harus mencari sumber penerimaan secara mandiri dari pihak ketiga yang dikelola sendiri di luar Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan, atas pungutan pihak ketiga (masyarakat dan pihak ketiga lainnya) tersebut Satker/UPT di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang menyelenggarakan program diklat di bidang transportasi melaporkan secara tersendiri laporan keuangannya tidak digabung pada laporan keuangan SAI Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan selalu menjadi temuan Tim BPK-RI.

Penerimaan biaya pendidikan selain SPPL oleh Satker-Satker Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang dikelola dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN dengan total penerimaan dana pendidikan dan pelatihan Tahun 2010 sebesar Rp. 81.780.852.750,00 serta penggunaan langsung sebesar Rp. 73.267.819.078,00 atas dana diklat tersebut sedangkan sisa dana per 31 Desember 2010 yang tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 8.513.033.672,-

Rincian dana sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

NO	Kode Satker	Nama Satker	Penerimaan Tahun 2010	Total Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Dana per 31 Desember 2010
1	526195	ATKP Medan	1.533.761.900,00	1.533.761.900,00	1.227.118.700,00	306.643.200,00
2	531954	BP2IP Surabaya	22.464.994.000,00	22.464.994.000,00	21.731.814.700,00	733.179.300,00
3	526181	ATKP Surabaya	4.306.005.000,00	5.965.806.000,00	4.226.390.000,00	1.739.416.000,00
4	526217	ATKP Makassar	1.686.017.852,00	2.126.065.252,00	1.496.379.735	629.685.517,00
5	414361	BP2IP Barombong	667.506.000,00	667.506.000,00	39.462.950,00	628.043.050,00
6	654603	BP2IP Mauk Tangerang	8.867.342.038,00	10.720.711.023,00	8.202.915.388,00	2.517.795.635,00
7	440006	Pusdiklat Aparatur Semplak		1.986.483.200,00	1.986.483.200,00	0,00
8	414355	STTD Bekasi	4.474.785.000,00	5.221.075.700,00	3.905.012.200,00	1.316.063.500,00
9	414298	BPPTD Tegal		194.682.500,00	194.682.500,00	0,00
10	288127	STPI Curug	23.627.522.750	25.483.895.375,00	24.942.788.405,00	541.106.970,00
11	517988	BPPTD Palembang	510.720.000,00	553.220.000,00	525.220.000,00	28.000.000,00
12	649910	BPPTD Bali	748.400.000,00	748.400.000,00	748.400.000,00	0,00
13	288965	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	4.114.251.800,00	4.114.251.800,00	4.041.151.300,00	73.100.500,00
		TOTAL	73.001.306.340,00	81.780.852.750,00	73.267.819.078,00	8.513.033.672,00

3. KOREKSI LRA

Terdapat koreksi LRA berupa belanja yaitu sebesar Rp. 131.712.615.624,- terdiri dari :

- a) Kurang disajikan sebesar Rp. 143.503.852.189,-, dikarenakan adanya realisasi anggaran dari dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) berupa SP3 yang diterbitkan bulan Januari sampai dengan April 2011 yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian dan Badan Pengembangan SDM.
- b) Lebih disajikan sebesar Rp. 11.791.236.565,- dikarenakan adanya double pencatatan SP3 yang terjadi pada Ditjen Perhubungan Udara

4. KENDALA-KENDALA/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN

Pada tahun 2010 realisasi belanja bruto sebesar Rp. 15.569.868.645.486,- terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 7.789.303.552,- sehingga realisasi netto sebesar Rp.15.562.079.341.934,- atau 86,96% dari anggaran sebesar Rp. 17.895.554.907.000,0.

Dalam pelaksanaan anggaran terdapat permasalahan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan yang bersumber dana PHLN dan hibah terkendala dengan prosedur pelaksanaan lelang dan administrasi pencairan yang harus menyesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing negara donor dan seringkali donor hanya melaporkan pelaksanaan pekerjaan namun tidak melaporkan terkait realisasi keuangan;
- b. Masih ada dana yang diblokir (tanda bintang);

- c. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan disebabkan antara lain adanya penolakan dari masyarakat setempat, belum adanya kesepakatan dengan PEMDA, ketidakpastian data dukung, sengketa tanah dan bencana alam;
- d. Penerbitan SP3 dari KPPN VI (KPPN khusus) yang melewati tahun anggaran sehingga cukup mempengaruhi realisasi ;
- e. Kurangnya pemahaman pengelola anggaran terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku.

Secara terinci pengungkapan dari masing-masing Eselon I sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT JENDERAL

Realisasi Eselon I Setjen Tahun 2010 sebesar Rp. 287.101.614.682,- atau 88,90 % sehingga yang kembali ke negara sebesar Rp. 35.838.611.318,- atau 11,10 % yang rinciannya sebagai berikut :

Sisa Kontrak (Belanja Modal) sebesar	Rp. 2.302.987.601,-
Langganan Daya dan Jasa sebesar	Rp. 2.253.298.200,-
Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar	Rp. 7.243.808.816,-
Transito belanja pegawai sebesar	Rp. 2.392.302.000,-
Sisa Anggaran sebesar	Rp. 21.646.214.701,-
Jumlah	Rp. 35.838.611.318,-

B. DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

I. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada Tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 1.720.361.328.200,- atau 93,58% dari anggaran hal ini disebabkan adanya :

- a. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 135.905.544.000,-

Untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.395.507.000,- yang terdiri dari:

No.	SATKER/KEGIATAN	ALOKASI DANA	ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN
1	Belanja Transito Satker Kantor Pusat Ditjen Phb Darat	Rp. 1.769.145.000,-	Kelebihan Alokasi Dana
2	Sisa Gaji Pegawai dan Lembur	Rp. 4.626.362.000,-	Kelebihan Alokasi Dana

Untuk Belanja Barang sebesar Rp. 33.248.501.000,- yang terdiri dari:

No.	SATKER/KEGIATAN	ALOKASI DANA	ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN
1	Satker Pengembangan Keperintisan Sisa Dana Subsidi Perintis SDP	Rp. 6.160.614.000,-	
2	Sisa Kontrak Subsidi Keperintisan LLAJ	Rp. 2.064.567.000,-	
3	Pakaian Dinas Pegawai	Rp. 81.600.000,-	Dana Non Alokasi (Diblokir)
4	Diklat Teknis Bekasi	Rp. 150.000.000,-	Dana Non Alokasi (Diblokir)
5	Sisa Dana Kegiatan (82 UPT/Satker)		
	- Belanja Barang Operasional	Rp. 5.155.433.000,-	
	- Belanja Barang Non Operasional	Rp. 500.000.000,-	
	- Belanja Langganan Daya dan Jasa	Rp. 1.800.000.000,-	
	- Belanja Pemeliharaan		
	- Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp. 500.000.000,-	
	- Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp. 5.436.287.000,-	
		Rp. 1.400.000.000,-	

Untuk Belanja Modal sebesar Rp. 96.261.536.000,- yang terdiri dari:

No	SATKER/KEGIATAN	ALOKASI DANA	ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN
1	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Sepeken Kabupaten Sumenep Thp I	Rp. 4.000.000.000,-	Adanya Penolakan Masyarakat setempat untuk melaksanakan pembangunan dermaga tersebut
2	Pembangunan Shelter Di Jabotetabek	Rp. 1.000.000.000,-	Belum adanya Kesepakatan dengan Dishub DKI Jakarta
3	TA.IBRD Road Safety Awareness 3843/INO SRIP(BLN)	Rp. 4.236.057.000,-	Lelang Ulang
4	Pembangunan Gedung Khusus sebesar	Rp. 5.000.000.000,-	Lelang Ulang
5	Pemb. Jembatan Terminal cekik di Bali	Rp. 3.000.000.000,-	Diblokir dikarenakan administrasi penghapusan Jembatan Timbang yang lama belum dapat dipenuhi
6	Pemasangan Alat PKB untuk Propinsi NAD dan Kalimantan Tengah	Rp. 1.707.000.000,-	Diblokir dikarenakan ketidak pastian data dukung
7	Pembangunan Gedung Operasional di 5 Lokasi (Sulut, Sultra, Sulsel, Ntt dan Kalabahi	Rp. 1.703.016.000,-	Diblokir dikarenakan Sertifikat Tanah/IMB belum ada
8	Pengadaan Alat Laboratorium	Rp. 476.800.000,-	Tidak disetujui pencairannya oleh DJA disebabkan tidak sesuai dengan Tupoksi
9	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda -2	Rp. 28.000.000,-	Dana Non Alokasi (diblokir)

10	Studi LLASDP	Rp. 100.000.000,-	Dana Non Alokasi (diblokir)
11	Sisa Kontrak Strategis Belanja Modal	Rp.46.678.681.000,-	
12	Sisa Kontrak Kegiatan Non Strategis - Studi	Rp.13.849.003.000,- Rp. 3.051.082.000,-	
13	Selisih Nilai Kontrak dengan Realisasi akibat tidak terpenuhinya progress fisik - Pemb. Dermaga Labuhan Tahap I (Fisik 44.89%) - Rehab Dermaga Saubeba (Fisik 20%) - Pemb. Terminal ALBN Entrop (Fisik 0.05%)	Rp. 2.227.993.000,- Rp. 1.586.143.000,- Rp. 7.617.461.000,-	Tidak terpenuhi karena gangguan alam, dan kondisi di lapangan. Tidak terpenuhi akibat bencana gempa. Tidak terpenuhi Akibat permasalahan sengketa tanah.

C. DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

1. Pagu Kegiatan TA. 2010

Total Pagu Anggaran sebesar **Rp. 4.623.016.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai : Rp. 737.609.233.000,-
- b. Belanja Barang : Rp. 1.218.728.582.000,-
- c. Belanja Modal : Rp. 2.666.678.185.000,-

2. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2010

- a. Realisasi penyerapan keuangan sebesar **Rp. 3.955.969.420.676,- (85,57%)** dan Fisik sebesar **86,5 %** dengan rincian menurut jenis belanja sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai : Rp. 668.732.812.774,- (90,66%)
- 2) Belanja Barang : Rp. 1.044.222.324.606,- (82,15%)
- 3) Belanja Modal : Rp. 2.243.014.283.296,- (84,11%)

- b. Terdapat penambahan realisasi Belanja Modal bila dibandingkan dengan realisasi *Unaudited* sebesar Rp 4.855.724.800,- karena adanya 10 (sepuluh) SP3 yang diterima Satker pada bulan Maret 2011, dengan rincian 7 (tujuh) SP3 pada Satker Pengembangan Pelabuhan Tg. Priok senilai Rp 2.744.630.576,- dan 3 (tiga) SP3 pada Satker *Maritime Telecommunication System Developmet Project* Rp 2.111.094.224,-.

3. Realisasi Keuangan pada 31 Desember 2010

- a. Penyerapan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 31 Desember 2010 sebesar Rp. 3.955.969.420.676,- (85,57%);

- b. Dana Tidak Terserap dan sisa belanja posisi 31 Desember 2010 sebesar Rp. 667.046.579.324,- (14,43%) dengan rincian :
- 1) Belanja Pegawai yang tidak terserap sebesar Rp. 49.189.481.381,- dan sisa belanja sebesar Rp. 19.686.938.845,-
 - 2) Belanja Barang yang tidak terserap sebesar Rp. 23.945.843.108,- dan sisa belanja sebesar Rp. 150.560.414.286,-
 - 3) Belanja Modal yang tidak terserap sebesar Rp. 98.396.110.365,- dan sisa belanja sebesar Rp. 325.267.791.339,-

4. Tanda Bintang

Total dana yang diblokir (tanda bintang) sebesar Rp. 267.498.122.000,- terdiri dari RM sebesar Rp. 20.906.402.000,- dan PLN sebesar Rp. 246.591.720.000,-.

(Dalam Ribuan Rp.)

NO	UPT/SATKER/URAIAN RINCIAN	TIDAK TERSERAP	KETERANGAN
	TOTAL DANA BINTANG/BLOKIR YANG TIDAK TERSERAP	267,498,122	
I	KEGIATAN TIDAK TERSERAP RUPIAH MURNI (RM)	20,906,402	
	TANDA BINTANG	20,906,402	
1	Pakaian Dinas di seluruh lingkungan Ditjen Hubla	5,322,460	pencairan tanda bintang Tidak disetujui oleh DJA (khusus pakaian dinas lapangan)
2	Satker Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut		
	Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran	1,159,214	Tidak dapat dicairkan terbentur dengan Peraturan Menkeu (PMK) No.119/PMK.02/2009 dan no.105/PMK.02/2008 (kegiatan penyelenggaraan Operasional & pemeliharaan perkantoran dibatasi)
	Pelayanan Publik atau Birokrasi (Pendidikan & Pelatihan Teknis)	3,805,142	Berdasarkan analisa DJA kegiatan ini merupakan tupoksi Badan Diklat
	Pengadaan Sarana & Prasarana (Meubelair & Kendaraan Bermotor)	2,357,743	Tidak dapat dicairkan terbentur dengan Peraturan Menkeu (PMK) No.119/PMK.02/2009 dan no.105/PMK.02/2008 (kegiatan pengadaan Meubelair & Kendaraan Bermotor dibatasi)
	Pembinaan Pemantauan & Evaluasi	609,285	Tidak dapat dicairkan terbentur dengan Peraturan Menkeu (PMK) No.119/PMK.02/2009 dan no.105/PMK.02/2008 (kegiatan pemantauan & evaluasi dibatasi)
3	Pembangunan Rumah Dinas UPT/Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	2,342,709	Tidak dapat dicairkan terbentur dengan Peraturan Menkeu (PMK) No.119/PMK.02/2009 dan no.105/PMK.02/2008 (kegiatan pembangunan rumah dinas dibatasi)
4	Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai		
	Penitipan Kapal	4,720,130	Proses audit BPKP belum selesai
5	Satker Peningkatan Keselamatan LALA Pusat		
	Penanggulangan bencana/tanggap darurat	361,444	Proses audit BPKP belum selesai
6	Non Alokasi DIPA di lingkungan Ditjen Hubla	228,275	Non alokasi (kelebihan alokasi)

II	KEGIATAN TIDAK TERSERAP PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN)	246,591,720	
	TANDA BINTANG (PHLN)	246,591,720	
1.	Satker Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta		
	- Lanj. Pemb. Urgent Rehabilitation of Tg. Priok Port	120,047,676	Non alokasi (kelebihan alokasi)
2.	Satker Maritime Telecommunication System Development Project		
	- Maritime Telecommunication System Development Project (Phase IV)	64,458,263	Non alokasi (kelebihan alokasi)
3.	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat		
	- Indosrep Project	42,619,200	Belum ada Loan Agreement (LA), LA ditandatangani setelah kontrak, saat ini dalam proses lelang
	- Pembangunan Vessel Traffic System di Selat Malaka	4,466,581	Non alokasi (kelebihan alokasi)
	- Improvement & Development of Indonesia Aids to Navigation	15,000,000	Belum ada Negara Donor

5. Kontrak Kegiatan Strategis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut :

- a. Jumlah paket kontrak kegiatan Strategis sebanyak 377 Pkt terdiri dari :
 - 1) Dana Rupiah Murni (RM) : 365 paket
 - 2) Dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) : 12 paket
- b. Telah dikontrakan sebanyak 367 paket terdiri dari :
 - 1) Dana Rupiah Murni (RM) : 360 paket
 - 2) Dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) : 7 paket
- c. Jumlah kegiatan yang belum bisa dikontrakan sebanyak 10 paket terdiri dari :
 - 1) Dana Rupiah Murni (RM) : 5 paket
 - 2) Dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) : 5 paket
- d. Kegiatan yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM), yang belum kontrak sebanyak 5 paket dengan nilai sebesar Rp 14.900.044.000,-, yaitu :
 - 1) Lanjutan rehab gedung kantor Adpel Surabaya : Rp. 3.380.044.000,- (2 paket: Fisik dan Supervisi) disebabkan waktu pelaksanaan tidak mencukupi karena menunggu pemeriksaan dan pengesahan desain dari Dinas Cagar Budaya Pemerintah Kota Surabaya;
 - 2) Pembangunan Kapal Perintis 750 DWT : Rp. 11.520.000.000,- (1 paket) disebabkan pelelangan gagal akibat semua penawaran di atas pagu anggaran;
 - 3) Pembangunan Faspel Poso (pemotongan anggaran) (2 paket : Fisik dan Supervisi).
- e. Kegiatan yang bersumber dari PLN, yang belum kontrak sebanyak 5 paket dengan nilai Rp. 67.990.200.000,- yaitu :
 - 1) *Indosrep Project* : Rp. 42.619.200.000,- (2 paket : Fisik dan Supervisi) disebabkan Loan Agreement menunggu penandatanganan kontrak sesuai prosedur dari Negara Donor;
 - 2) *Improvement & Development of Indonesia Aids to Navigation* : Rp. 15.000.000.000,- (2 paket : Fisik dan Supervisi) disebabkan belum ada kesepakatan mekanisme pinjaman dengan Negara Donor;

- 3) Lanjutan Pembangunan *Urgent Rehabilitation of Tg. Priok Port* Rp. 10.371.000.000,- (1 paket : Konstruksi) disebabkan proses lelang dalam tahap pengajuan persetujuan dari Negara Donor.

6. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Ditjen Perhubungan Laut

a. Bidang Angkutan Laut:

- 1) Subsidi Pelayaran Perintis : Trayek pelayaran perintis sebanyak 60 trayek di 30 pangkalan perintis (Rp. 279.069.758.000,-);
- 2) Pembangunan Kapal Perintis : Pembangunan kapal perintis sebanyak 3 unit yaitu sebanyak 1 unit kapal perintis 750 DWT dan 2 unit kapal perintis 500 DWT (Rp. 41.580.000.000,-);
- 3) Pembangunan Kapal : Pembangunan kapal sebanyak 3 unit kapal 1200 GT (Rp. 69.069.330.000,-);
- 4) *National Single Window*, pengembangan INAPORTNET untuk mendukung NSW (Rp. 9.700.000.000,-);
- 5) Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Sistem Informasi Manajemen : Pembangunan 1 paket di Tanjung Priok dan Tanjung Perak pada satker LALA Angkutan Laut Pusat (Rp. 9.315.631.000,-);
- 6) Pengadaan dan pemasangan peralatan *tracking system* 1 paket pada satker LALA Angkutan Laut Pusat (Rp. 987.000.000,-);
- 7) Kajian dan survey armada angkutan laut pada satker LALA Angkutan Laut Pusat (Rp. 600.000.000,-);
- 8) Pengembangan Website Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal pada satker LALA Angkutan Laut Pusat Rp. 555.000.000,-.

b. Bidang Fasilitas Pelabuhan Laut dan Sarana Pendukungnya :

- 1) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut :
Pembangunan fasilitas pelabuhan di 65 lokasi sebanyak 98 paket yaitu :
Kanpel Singkel, Kanpel Calang(NAD), Adpel Gunung Sitoli, Kanpel Tg. Tiram, Kanpel Tg. Beringin, Satker Labuhan Angin(SUMUT), Adpel Tg. Pinang, Satker Laut Pulau terluar (Kepulauan Riau), Satker Laut Cerocok Painan (SUMBAR), Satker Laut Tg. Batu-Manggar (BABEL), Kanpel Pamanukan (JABAR), Kanpel Karimun Jawa, Kanpel Jepara, Satker Laut Batang dan Rembang (JATENG), Kanpel Branta (JATIM), Adpel Ende, Kanpel Atapupu, Kanpel Labuhan Bajo, Satker Laut Reo (NTT), Adpel Kuala Pembuang (KALTENG), Satker Laut Pelaihari-Tanah Laut, Tanjung Batu-Kotabaru (KALSEL), Satker Penajam Pasir dan Karingau/Balikpapan, Satker Sei Nyamuk (KALTIM), Kanpel Tahuna, Kanpel Lirung, Kanpel Ulu Siau, Kanpel Belang, Satker Bitung (SULUT), Kanpel Talamuta, Kanpel Anggrek (GORONTALO), Satker Laut Pantoloan, Kanpel Parigi, Kanpel Leok, Kanpel Banggal (SULTENG). Adpel Kendari, Kanpel Raha, Kanpel Bau-Bau

(SULTRA), Kanpel Jampea, Kanpel Siwa, Satker Pamatata, Satker Garongkong (SULSEL), Kanpel Polewali, Kanpel Mamuju, Satker Laut Pasang Kayu dan Budong-budong (SULBAR), Adpel Ambon, Satker Tulehu-Maluku, Satker Adault-Maluku, Satker Laut Tepa dan Saumlaki, Satker Laut Bemo, Satker Bula, Kanpel Waisarisa, Satker Lakor, Kanpel Geser, Satker Ilwaki, Satker Laut Ambalau, Satker Laut Namrole (MALUKU), Satker A. Yani Ternate-Malut, Satker Falabisahaya-Malut, Kanpel Tobelo, Kanpel Labuha/Babang, Kanpel Jailolo (MALUKU UTARA), Adpel Depapre, Kanpel Sarmi, Kanpel Pomako (PAPUA), Adpel Sorong, Kanpel Kaimana, Kanpel Oransbari, Satker Raja Ampat dan Arar Sorong (Papua Barat), Satker Pelabuhan Dumai, dan Satker Tg. Priok (Rp1.166.458.834.000,-).

- 2) Kegiatan Penunjang Fasilitas Pelabuhan Laut :
 - a) Survey inventaris untuk 4 lokasi otoritas pelabuhan pada satker Pelabuhan dan Pengerukan Pusat (Rp. 1.500.000.000,-);
 - b) Penyusunan Masterplan pelabuhan pada 7 lokasi Pembangunan Faspel Laut pada satker Pel. Peng. Pusat (Rp. 3.500.000.000,-).

c. Bidang Keselamatan Pelayaran dan Fasilitas Pendukungnya :

- 1) KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai)
 - a) Rehab Kapal Patroli di PLP Tg. Priok (Rp. 3.000.000.000,-);
 - b) Pembangunan kapal patroli KPLP kls III sebanyak 20 unit pada satker KPLP Pusat, 16 unit dalam penyelesaian, 4 unit lanjutan. (Rp. 45.605.000.000,-);
 - c) Pembangunan kapal patroli kelas III sebanyak 2 unit pada satker KPLP Pusat (Rp. 12.000.000.000,-);
 - d) Pembangunan kapal kelas I-B 1 unit pada satker KPLP Pusat. (Rp. 46.000.000.000,-);
 - e) Pengadaan fasilitas pemadam kebakaran 1 paket pada satker KPLP Pusat (Rp. 5.000.000.000,-);
 - f) Pengadaan peralatan SAR 15 set pada satker KPLP Pusat (Rp. 4.500.000.000,-);
 - g) Pembangunan kapal patrol kelas I-A 1 unit pada satker KPLP Pusat (Rp. 46.304.910.000,-).
- 2) Pengerukan
Pengerukan Alur Pelayaran di 7 lokasi, yaitu :
 - a) Adpel Teluk Bayur yaitu pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan Muara Padang (Rp. 5.726.784.000,-);
 - b) Adpel Palembang (Rp. 28.544.075.000,-);
 - c) Adpel Muntok (Rp. 6.956.352.000,-);
 - d) Adpel Tegal (Rp. 6.583.672.000,-);
 - e) Kanpel Brebes (Rp. 4.046.058.000,-);

- f) Adpel Kumai (Rp. 9.537.584.000,-);
 - g) Adpel Samarinda yaitu pengerukan alur pelayaran sungai Mahakam (Rp. 20.128.749.000,-).
- 3) Perkapalan dan Kepelautan
Pembangunan Kapal Marine Surveyor 10 unit pada satker KAPPEL Pusat (Rp. 6.455.460.000,-).
- 4) Kenavigasian
- a) Pembangunan dermaga di 2 lokasi yaitu dermaga di Disnav Sorong dan dermaga khusus Kapal Negara di Disnav Sibolga (Rp. 6.983.625.000,-);
 - b) Pembangunan stasiun monitoring RMCS pada Disnav Tg. Priok (Rp. 1.700.000.000,-);
 - c) Docking Kapal 1 paket di Disnav Tg. Priok (Rp1.500.000.000,-);
 - d) Pembangunan ramsu depan dan belakang nusakambangan pada Disnav Cilacap (Rp. 1.186.804.000,-);
 - e) Rehab kapal navigasi 1 unit di Disnav Surabaya (Rp. 1.500.000.000,-);
 - f) Pembangunan dermaga kenavigasian Tenau di Disnav Kupang (Rp. 4.000.000.000,-);
 - g) Pembangunan Menara Suar di gunung Wenang di Disnav Bitung (Rp1.935.814.000,-);
 - h) Pembangunan Rambu Suar di 2 lokasi sebanyak 4 unit yaitu di Disnav Tual dan Disnav Ambon (Rp. 54.370.509.000,-);
 - i) Rehab fasilitas galangan Kapal di 1 lokasi yaitu di Disnav Jayapura (Rp. 1.500.000.000,-);
 - j) Pengadaan tanah di 1 lokasi yaitu di Disnav Sorong (Rp. 3.400.000.000,-);
 - k) Review masterplan kenavigasian 1 paket pada Satker Kenavigasian Pusat (Rp. 925.000.000,-);
 - l) Pengadaan pelampung suar 40 unit pada Satker kenavigasian Pusat (Rp. 9.000.000.000,-);
 - m) Pengadaan peralatan SNBP elektronik 1 paket pada Satker kenavigasian Pusat (Rp.24.000.000.000,-);
 - n) Pengadaan perangkat monitoring SBNP 1 paket pada Satker kenavigasian Pusat (Rp26.170.000.000,-);
 - o) Pengadaan kapal *inspection Boat* 1 unit pada Satker kenavigasian Pusat (Rp. 10.000.000.000,-);
 - p) Pengadaan sistem lampu suar 1 paket pada Satker kenavigasian Pusat (Rp. 25.000.000.000,-);
 - q) Pengadaan peralatan bengkel 1 paket pada Satker kenavigasian Pusat (Rp. 5.000.000.000,-);

- r) Pengadaan VTIS 3 paket pada satker Satker kenavigasian Pusat (Rp. 64.000.000.000,-);
- s) Pengadaan GMDSS SROP 1 paket pada Satker kenavigasian Pusat (Rp. 4.080.000.000,-);
- t) Pengadaan peralatan survey hidrografi kenavigasian 1 paket pada Satker kenavigasian Pusat (Rp. 5.000.000.000,-);
- u) Pengadaan *Maintenance and Replacement of Aids to Navigation (ANF)* 2 paket pada Satker kenavigasian Pusat (Rp. 47.427.829.000,-);
- v) Pengadaan dan instalasi *Maritime Telecommunication System Dev. Project* 1 paket (Rp. 356.219.400.000,-).

7. Kendala dan Hambatan Masih Rendahnya Realisasi Daya Serap Anggaran

- a. Untuk kegiatan bersumber dana PHLN pada umumnya terkendala dengan prosedur pelaksanaan lelang dan administrasi pencairan yang harus menyesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing Negara Donor;
- b. Untuk kegiatan Rupiah Murni disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Perbedaan persepsi dengan Kementerian Keuangan dalam pembahasan pelaksanaan anggaran;
 - 2) Keterlambatan pelaksanaan karena menunggu proses teknis yang dilakukan oleh instansi lain seperti dalam hal audit dan pengesahan desain;
 - 3) Keterlambatan pelaksanaan akibat kendala cuaca buruk seperti pada kegiatan Keperintisan dan konstruksi fasilitas pelabuhan;
 - 4) Keterlambatan pelaporan realisasi anggaran oleh beberapa UPT/Satker Ditjen Hubla.

8. Langkah – Langkah Percepatan Pelaksanaan Anggaran

- a. Telah diinstruksikan kepada para KPA melalui surat Dirjen Hubla, agar para KPA/PPK segera mengambil langkah-langkah melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan;
- b. Telah dilaksanakan revisi Rencana Penarikan Uang (RPU) di lingkungan Ditjen Hubla secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan
- c. Telah dilakukan sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran kepada para UPT dan Satker di lingkungan Ditjen Hubla dengan melibatkan Kementerian Keuangan sebagai narasumber.

D. DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

- 1. Realisasi anggaran pada satker Bandar Udara Pagar Alam masih rendah (4,57%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,- disebabkan karena dana APBN belanja modal untuk tahun 2010 tidak dilaksanakan karena

Pemkot Pagar Alam telah melaksanakan pembangunan bandara melalui dana APBD dengan sistem tahun jamak, untuk semua pekerjaan yang terdapat dalam RTT. Jadi pekerjaan lanjutan land clearing sisi udara termasuk pengawasan, pekerjaan konstruksi telah masuk dana APBD kota Pagar Alam.

2. Realisasi anggaran pada kegiatan yang dibiayai dari sumber dana hibah luar negeri masih banyak yang bertanda bintang dan realisasi pencairan dana dari pemberi hibah susah didapatkan sehingga surat pengesahan pembayarannya belum bisa diterbitkan.
3. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LRA sebesar Rp. 403.426.296.000,- berbeda dengan estimasi penerimaan PNBPN yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp. 450.026.111.687,-. Hal ini diakibatkan dalam pembahasan RKA/KL yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran telah dilampirkan target PNBPN untuk semua UPT dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, namun setelah DIPA diterbitkan ternyata tidak semua DIPA umum yang telah diusulkan targetnya muncul dalam estimasi PNBPN.
Realisasi PNBPN pada LRA ini sebesar Rp. 293.171.987.629,- (72,67%) jika dibandingkan dengan estimasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maka realisasinya sebesar 65,13%.

E. DITJEN PERKERETAAPIAN

1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan 31 Desember 2010 belum mempunyai PNBPN sebagai sumber pendapatan Negara Bukan Pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
2. Realisasi Belanja per 31 Desember 2010 merupakan realisasi anggaran DIPA TA 2010 dari 25 (dua puluh lima) satuan kerja/kantor yang berada di 10 (sepuluh) wilayah/propinsi dalam lingkup Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari WA Tahun 2010 yang terbit sampai dengan 31 Desember 2010.
3. Rincian WA Tahun 2009 dan 2010 yang Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan (SP3) nya terbit pada Tahun 2010 sebagai berikut :

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2010 (Audited)

No.	No.WA	Loan	Tgl WA	Kurs	Realisasi WA	No.SP3	Tgl SP3	Realisasi SP3	
Satker Perencanaan Teknis dan Pengawasan Perkeretaapian									
1	00026	IP-489	19-Feb-10	102,7568	JPY	22,542,394	858441C	9-Apr-10	2,314,070,291
2	00027	IP-489	19-Feb-10	102,7568	JPY	6,840,870	858442C	9-Apr-10	696,389,000
3	00153	IP-489	26-Mar-10	98.209	JPY	105,824,128	858618C	20-Apr-10	10,382,573,330
4	00157	IP-489	26-Mar-10	98.209	JPY	54,911,541	858624C	20-Apr-10	5,433,082,962
5	00435	IP-489	25-Jun-10	102.4124	JPY	27,006,000	860105C	22-Jul-10	2,765,749,274
6	00437	IP-489	28-Jun-10		JPY	5,502,616	860106C	22-Jul-10	552,103,184
7	00989	IP-489	27-Aug-10		JPY	2,207,861	861602C	13-Oct-10	232,669,000
8	00988	IP-489	27-Aug-10	104.8915	JPY	7,701,068	861596C	13-Oct-10	806,969,643
9	00677	IP-489	29-Jul-10		JPY	2,273,477	861679C	15-Oct-10	232,269,000
10	00668	IP-489	29-Jul-10	104.3711	JPY	6,805,799	861678C	15-Oct-10	709,619,108
11	01636	IP-489	19-Nov-10	107.68135	JPY	18,650,966	864705C	31-Dec-10	2,006,354,878
12	01634	IP-489	19-Nov-10		JPY	6,862,840	864737C	31-Dec-10	732,960,424
13	00840	IP-536	12-Aug-10		JPY	12,772,315	861393C	8-Oct-10	4,463,592,394
14	01448	IP-536	12-Nov-10	107.68135	JPY	116,814,719	864706C	31-Dec-10	12,566,200,443
15	01676	IP-536	24-Nov-10	107.68135	JPY	137,021,001	864729C	31-Dec-10	14,739,866,512
16	01658	IP-536	22-Nov-10		JPY	77,014,574	864738C	31-Dec-10	8,194,150,776
17	02023	IP-489	17-Dec-10	176,500	JPY	2,363,132	865360C	31-Dec-10	252,176,500
18	02024	IP-489	17-Dec-10	7.403.062	JPY	7.395.667	865361C	31-Dec-10	808,642,388
19	02027	IP-540	17-Dec-10	109.03945	JPY	33.219.136	865362C	31-Dec-10	3,618,583,187
20	02035	IP-536	17-Dec-10	109.03945	JPY	63.894.080	865363C	31-Dec-10	6,960,080,777
21	02034	IP-536	17-Dec-10	109.03945	JPY	47.026.001	865378C	31-Dec-10	5,018,275,688
Satker Prasarana Perkeretaapian Jabotabek									
1	00091	IP-490	19-Mar-10	98,6685	JPY	2,513,410	858502C	14-Apr-10	247,746,736
2	00092	IP-490	19-Mar-10	98,6685	JPY	6,473,574	858503C	14-Apr-10	650,150,000
3	00025	KFW 200266973 GERMANY	31-Dec-10	11,863.55	EUR	563,099	859106C	26-May-10	6,680,358,005
4	00025	KFW 200266973 GERMANY	31-Dec-10	11,863.55	EUR	563,099	859116C	26-May-10	18,914,622,588
5	00672	IP-490	29-Jul-10		JPY	34,436,637	861391C	8-Oct-10	3,518,206,510
6	00673	IP-490	29-Jul-10	104.3711	JPY	104,021,805	861681C	15-Oct-10	10,846,024,280
Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Utara Jawa									
1	00081	IP-480	18-Mar-10	99,508	JPY	59,029,671	858508C	14-Apr-10	59,348,821,309
2	00143	IP-489	14-Apr-10	99,508	JPY	10,000,000	858506C	14-Apr-10	993,508,000
3	00441	IP-489	28-Jun-10	103.6724	JPY	40,833,641	860449C	10-Aug-10	4,097,029,810
4	00439	IP-489	29-Jun-10	103.6724	JPY	750,610	860446C	10-Aug-10	77,746,109
5	00438	IP-489	29-Jun-10	103.6724	JPY	15,526,387	860445C	10-Aug-10	1,608,049,844
6	00442	IP-489	28-Jun-10	103.6724	JPY	9,401,824	860447C	10-Aug-10	943,328,981
7	00764	IP-489	5-Aug-10	104.9829	JPY	3,014,361	861083C	21-Sep-10	316,140,255
8	00739	IP-489	3-Aug-10	104.9829	JPY	75,120,186	861082C	21-Sep-10	7,709,987,772
9	00839	IP-489	12-Aug-10	106.58615	JPY	1,804,519	8611495C	11-Oct-10	192,144,664
10	00841	IP-489	12-Aug-10	106.58615	JPY	46,638,193	861392C	8-Oct-10	4,867,023,991
11	01178	IP-489	29-Oct-10	106.58615	JPY	253,782,362	862385C	5-Nov-10	26,806,516,360
12	01177	IP-489	29-Sep-10	109.6664	JPY	5,630,176	862384C	5-Nov-10	616,824,369
13	01295	IP-489	21-Oct-10	110.0558	JPY	21,717,442	862970C	1-Dec-10	2,372,262,964
14	01294	IP-489	21-Oct-10	110.0558	JPY	164,620	862972C	1-Dec-10	18,099,336
15	01632	IP-480	19-Nov-10	107.68135	JPY	329,241	864736C	31-Dec-10	35,417,795
16	02017	IP489	17-Dec-10	109.3265	JPY	164,621	865410C	31-Dec-10	17,979,508
17	01837	IP-489	9-Dec-10	109.074	JPY	290,549,121	865411C	31-Dec-10	31,109,074,240
18	01853	IP-489	9-Dec-10	107.9889	JPY	36,381,771	865412C	31-Dec-10	3,924,902,573
19	02016	IP-489	17-Dec-10		JPY	262,621,167	865414C	31-Dec-10	28,025,356,973
Satker Pembangunan Double-Double Track									
1	00156	IP-508	26-Mar-10	98,2097	JPY	13,404,139	858621C	26-Apr-10	11,126,259,409
2	00155	IP-508	26-Mar-10	98,2097	JPY	35,215,556	858620C	20-Apr-10	3,484,313,760
3	01754	IP-508	30-Jan-10		JPY	36,221,094	865002C	31-Dec-10	3,866,263,568
4	01755	IP-508	30-Nov-10	10768235	JPY	176,012,236	865001C	31-Dec-10	18,934,476,767
Satker Pengembangan Sarana Perkeretaapian									
1	00013	KFW 200266973 GERMANY	13-May-10	563.992	EUR	17,546,540.28	858870C	11-May-10	7,210,502,361
2	02069	KFW 200266973 GERMANY	28-Dec-09	13347.46	EUR	3,485,907.99	859234C	31-May-10	81,424,030,655
3	00013	KFW 200266973 GERMANY	13-May-10	11.670,295	EUR	17,546,540.28	860303C	2-Aug-10	29,732,414,889
4	00013	KFW 200266973 GERMANY	13-May-10	11.670,295	EUR	17,546,540.28	860840C	30-Aug-10	1,730,950,855
5	00909	KFW 200266973 GERMANY	19-Aug-10	11530.48	EUR	31,925.00	861496C	11-Oct-10	368,110,574
6	00913	KFW 200266973 GERMANY	7-Sep-10	11530.48	EUR	31,925.00	861484C	11-Oct-10	368,110,574
7	00013	KFW 200266973 GERMANY	13-May-10	12.039,555	EUR	17,546,540.28	861919C	22-Oct-10	7,082,456,045
8	01246	KFW 200266973 GERMANY	15-Oct-10	12.265,11	EUR	1,880,744.54	863109C	3-Dec-10	32,066,283,802
9	00013	KFW 200266973 GERMANY	25-Nov-10	11.936,095	EUR	17,546,540.28	864188C	29-Dec-10	6,065,439,709
10	00013	KFW 200266973 GERMANY	13-May-10	12.351,455	EUR	17,564,540.28	864178C	29-Dec-10	2,012,817,315
11	01608	KFW 200266973 GERMANY	10-Nov-10	11.956,165	EUR	31,925	864617C	31-Dec-10	381,700,567
12	01836	KFW 200266973 GERMANY	9-Dec-10	11990.84	EUR	31,925	864641C	31-Dec-10	382,807,567
11		KFW 200266973 GERMANY		11990.84	EUR	31,925	864187C	29-Dec-10	6,139,875,942
Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Prasarana Perkeretaapian									
1	01949	IP-548	15-Dec-10	109,03945	JPY	91,321,700	865422C	31-Dec-10	9,957,667,941
2	01951	IP-548	15-Dec-10	109,03945	JPY	57,702,286	865425C	31-Dec-10	6,195,171,400
JUMLAH SP3 Tahun 2009								525,953,355,431	

4. Pengembalian Belanja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2010 sebesar Rp. 1.721.626.847,- adalah pengembalian dari Belanja Pegawai (pengembalian belanja gaji dan tunjangan PNS serta belanja honorarium), Belanja Barang (pengembalian belanja barang operasional, belanja barang non operasional dan belanja perjalanan Dalam Negeri), Belanja Modal (pengembalian belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal jalan dan jaringan)
5. Pengembalian Belanja TA 2010 diantaranya karena adanya kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga dikarenakan target realisasi fisik konstruksi tidak tercapai.
6. Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja TA. 2010

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja
1	2	3
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.504.523
52	Belanja Barang	Rp. 3.828.900
53	Belanja Modal	Rp. 1.715.293.424
57	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0
Dst.	Dst	Rp. 0
	Jumlah	Rp. 1.721.626.847

7. Realisasi Belanja Ditjen Perkeretaapian Tahun Anggaran 2010 menunjukkan daya serap/realisasi sebesar Rp. 3.418.687.750.911,- atau mencapai 87,28% dari anggaran sebesar Rp. 3.916.862.387.000,- yang terdiri dari realisasi anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 2.851.058.380.452,- atau 95,11% dari anggaran sebesar Rp. 2.997.592.081.000,- dan realisasi anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 525.953.255.431,- atau mencapai 60,48% dari anggarannya sebesar Rp. 869.663.932.000,- Realisasi Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp. 41.676.115.028,- atau sebesar 83,96 dari anggarannya sebesar Rp. 49.636.374.000,-
8. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada DIPA TA 2010 Ditjen Perkeretaapian sebagai berikut:
 - a. DED Pembangunan Jalan KA lintas Duri – Dumai pada Satker Pengembangan dan Peningk.Fasilitas Prasarana Perkeretaapian tidak diproses lanjut karena sebagian kegiatan telah dilaksanakan (6,75 Km) dan antara stasiun Dumai – Pelabuhan belum ada pradesainnya.
 - b. Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian NAD:
 - 1) Pemb.tubuh baan lintas Lhokseumawe-Bireun antara Simpang Mane - Kota Blang
 - 2) Pemasangan rel sepanjang 3.150 M'sp pada seksi Blang Pulo – Cunda
 - 3) Pembangunan perlintasan KA seksi Kr.Mane - Cunda sebanyak 8 unit

Hal tersebut dikarenakan belum ada ijin dari Pemda setempat, karena di lokasi tersebut merupakan daerah padat penduduk

- c. Satuan Kerja Pembangunan Double-double Track:
- 1) Pembangunan Double-double Track - Loan JICA IP-508 dikarenakan Pagu awal sebesar Rp.250.000.000.000,-, dalam perkembangan selanjutnya dilakukan Revisi POK untuk dialihkan pada kegiatan Jasa Konsultan sebesar Rp.25.000.000.000 sehingga tersisi Rp.225.000.000.000, saat ini kegiatan Pemb. DDT Loan JICA IP-508 masih dalam proses lelang untuk paket B1, diperkirakan baru bisa kontrak 2011
 - 2) Pengadaan Tanah dikarenakan alokasi untuk pembebasan lahan rumah dinas PT.KA, masih menunggu proses penghapusan aset dari kementerian BUMN dan kementerian keuangan.
 - 3) Dana untuk sertifikat tanah digunakan untuk pembebasan lahan rumah dinas PT.KA, namun masih menunggu proses penghapusan aset dari kementerian BUMN dan kementerian keuangan
- d. Pemb. Jalur Ganda KA Lintas Selatan Jawa Tahap III (Kroya - Kutoarjo) - Loan JICA IP-548 pada Satuan Kerja Peningk.Jalan KA Lintas Selatan Jawa dikarenakan Menunggu kegiatan Review Desain Engineering Services Railway DT on Java South Line III (Kutoarjo - Kroya), Loan JBIC IP-540 pada Satker Perencanaan Teknis dan Pengawasan Perkeretaapian selesai dilaksanakan.
- e. Pengadaan Fish Plate sebanyak 181 set (optimalisasi) pada Satuan Kerja Pengembangan Fasilitas Perawatan Prasarana Kereta Api hal tersebut dikarenakan Penyedia barang jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
- f. Pembebasan Tanah antara Stasiun Brebes - Stasiun Losari pada Satuan Kerja Peningk.Jalan KA Lintas Utara Jawa dikarenakan masih dalam proses koordinasi dengan Pemda setempat.
- g. Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Tegal – Pekalongan:
- 1) Manajemen Konstruksi hal tersebut dikarenakan belum ada petunjuk pelaksanaan dari Direktorat teknis terkait
 - 2) Pembebasan Tanah dan Pemb. Empl. Termasuk Relokasi Jalan, Sal.Irigasi dan Penertiban Bangunan Tegal – Pekalongan hal tersebut dikarenakan dari pagu sebesar Rp. 10.000.000.000,- terserap sebesar Rp.5.500.000.000,- karena ada sebagian tanah yang belum bisa dibebaskan
- h. Jasa Konsultansi Track Maintenance Improvement Programme (PHLN) pada pada Satuan Kerja Pengemb. Fas. Perawatan Prasarana Perkeretaapian, hal tersebut karena dalam proses pelelangan, diperkirakan kontrak TA 2011.

- i. Pembebasan Tanah pada Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur hal tersebut dikarenakan dari pagu sebesar Rp.14.324.500.000,- hanya terserap sebesar Rp.6.835.393.000,- karena ada sebagian tanah yang belum bisa dibebaskan.
- j. Satuan Kerja Prasarana Kereta Api Jabotabek:
 - 1) Penertiban bangunan dijalur KA (10.000 m²) pada lintas Duri – Tangerang Rp. 5.000.000.000,- karena lahan tersebut milik Pemerintah
 - 2) Konsultan Lokal untuk Pengadaan Sub Stasiun Depo Depok pada Satuan Kerja Prasarana KA Jabotabek dikarenakan belum ada persetujuan untuk pengadaan Sub Stasiun Depok Lama dan posisi saat ini masih dalam tahap penilaian kewajaran harga sub station.

F. BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

1. Pada belanja pegawai masing-masing satuan kerja di lingkungan Badan Litbang Perhubungan dianggap masih cukup besar hal ini diakibatkan belanja pegawai transito yang jumlahnya cukup besar yang tidak digunakan yaitu sebesar Rp. 1.384.010.000,-.
2. Pada Tahun Anggaran 2010 satuan kerja di lingkungan Badan Litbang Perhubungan mempunyai MAK yang ditanda bintang (pakaian dinas dan belanja operasional lainnya) dan MAK tersebut telah direvisi dengan sisa dana blokir Rp. 92.972.000,-.
3. Satker di lingkungan Badan Litbang Perhubungan juga telah melakukan revisi pada belanja barang non operasional yaitu biaya requitment pegawai sebesar Rp. 82.500.000,-

G. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pada tahun 2010 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menerima pagu DIPA untuk 24 (dua puluh empat) satuan kerja, sebagai berikut pagu awal sebesar Rp. 1.472.198.018.000,- dan pagu akhir sebesar Rp. 2.572.463.318.000,-
2. Realisasi DIPA tahun 2010 sampai dengan posisi 31 Desember 2010 sebesar Rp. 2.100.995.239.179,- dengan persentase keuangan 81.67%. Tidak optimalnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan hal sebagai berikut :
 - a. Adanya kegiatan yang bertanda bintang atau blokir sebesar Rp. 78.794.920.000,-
 - b. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebesar Rp.173.747.028.200,- terdiri dari :

- 1) Pusdiklat Darat :
Kegiatan Penyusunan FS/Study Kelayakan Rp. 5.835.000.000,- hal ini dikarenakan Blokir Bintang baru dibuka di pertengahan Agustus dari DJA sehingga waktu kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena waktunya tidak mencukupi.
- 2) Pusdiklat Udara :
Jasa Konsultan Master Plan Rp. 2.000.000.000,- berdasarkan rekomendasi LKPP harus dilakukan pelelangan ulang karena perbedaan pagu yang disetujui. Dengan pelelangan ulang waktu penyelesaian kegiatan tidak mencukupi.
- 3) Pusdiklat Laut :
Kegiatan Modernisasi lembaga dan Pembangunan BP2IP Sorong Rp. 109.390.000.000,- tidak dapat dilaksanakan waktu pelaksanaan tersebut tidak dapat memenuhi target.
- 4) Sekretariat Badan Diklat total Rp. 1.468.400.000,-
Review Blue Print Rp. 840.500.000,- pelelangan batal karena yang memasukan penawaran kurang dari 3 peserta (sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003) dan jika dilaksanakan waktunya tidak mencukupi.
Pengembangan alat evaluasi pembelajaran sarana pembentukan sikap mental Rp. 627.900.000,- tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya tenaga ahli yang menangani peralatan tersebut.
- 5) PIP Makassar :
Kegiatan rehabilitasi Gedung Bengkel Mesin Rp. 1.851.465.000,- tidak dapat dilaksanakan karena alokasi waktu yang tidak mencukupi.
- 6) STTD Bekasi :
Overhaul kendaraan Operasional Roda 6 Rp. 300.000.000,- dana yang tersedia tidak mencukupi.
- 7) PIP Semarang :
Pengelolaan Laboratorium Kapal Latih Rp. 508.862.000,- tidak dilaksanakan karena kapal Negara kondisi dalam perawatan dan belum maksimal dioperasikan.
- 8) BP2TL Jakarta :
Pembangunan Laboratorium dan Peralatan ISTS Rp. 48.522.351.200,- waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
- 9) Balai Diklat Penerbangan Palembang :
Belanja Sewa Rp. 2.000.000,- tidak digunakan karena menggunakan fasilitas kantor.

- 10) BP3IP Jakarta :
Biaya Pemeliharaan alat simulator Laboratorium Rp. 142.258.000,- masih dalam masa pemeliharaan pihak ke-3 sehingga dana tersebut tidak digunakan.
 - 11) BP2IP Surabaya :
Perbaikan Steering gear Rp. 1.000.000.000,- tidak digunakan karena ruangan untuk penempatan Steering Gear belum siap karena anggaran pengadaannya masih belum tersedia.
 - 12) BP2IP Barombong :
Transportasi BBM, Gas, air PDAM Rp. 104.500.000,- sudah termasuk dengan BBM kapal Latih sedangkan Biaya Gas dan Air PDAM dana yang diberikan tidak mencukupi.
 - 13) BP2IP Sorong :
Layanan daya, perawatan generator, pembinaan administrasi Rp. 2.371.192.000,- karena menggunakan genset satuan biaya diukur dengan liter, biaya ini tidak digunakan karena duplikasi anggaran.
 - 14) BP2TD Tegal :
Pengadaan Fasilitas Konseling Rp. 50.000.000,- tidak tersedianya tenaga ahli sehingga tidak dapat dilaksanakan.
 - 15) Balai Diklat Pnb Jayapura :
Sewa Jaringan Internet Rp. 201.000.000,- tidak dilaksanakan karena terbentur pelaksanaan di KPPN karena tidak dilelangkan.
- c. Sisa Kontrak sebesar Rp. 71.490.802.600,-
- d. Kelebihan belanja pegawai, transito, dan sisa dana kegiatan sebesar Rp. 122.356.774.953,-
- e. Sisa Dana BLU sebesar Rp. 25.078.553.068,-

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Aset
Rp.80,01
trilyun

Posisi Neraca per 31 Desember 2010 adalah Aset sebesar Rp.80.007.078.957.656,- Kewajiban sebesar Rp 486.495.561.796,- dan Ekuitas Dana Neto sebesar Rp 79.520.583.395.860,-.

Tabel 15.

Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan/(penurunan)
Aset	80.007.078.957.656	64.767.792.453.679	15.239.286.503.977
Kewajiban	486.495.561.796	95.754.704.228	390.740.857.568
Ekuitas Dana	79.520.583.395.860	64.672.037.749.451	14.848.545.646.409

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 80.007.078.957.656,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.723.628.795.671,- Aset Tetap sebesar Rp 76.948.072.224.400,- dan Aset Lainnya sebesar Rp 1.335.377.937.585,-.

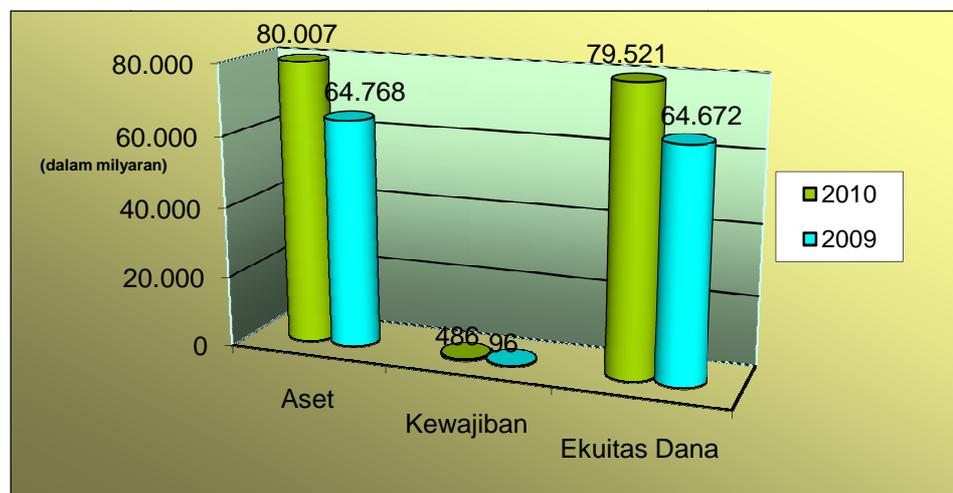
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp 486.495.561.796,- merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 486.495.561.796,-

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp 79.520.583.395.860,- terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 1.237.133.233.875,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 78.283.450.161.985,-

Grafik komposisi neraca dapat disajikan di bawah ini:

Grafik 5 .

Komposisi Neraca



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 854,09
juta.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) sebesar Rp 854.093.528,- dan sebesar Rp 905.181.222,-

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 16.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per eselon I

Kode	Uraian Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan/Penurunan
01	Sekretaris Jenderal	357.710.031	462.322.640	(104.612.609)
03	Ditjen Perhubungan Darat	18.681.000	95.249.864	(76.568.864)
04	Ditjen Perhubungan Laut	204.162.810	135.840.395	68.322.415
05	Ditjen Perhubungan Udara	273.539.687	170.025.562	103.514.125
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	0	1.260.500	(1.260.500)
13	Badan SAR Nasional	0	40.482.261	(40.482.261)
Total		854.093.528	905.181.222	(51.087.694)

Daftar Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 17.

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2009

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
01	Sekretaris Jenderal	462.322.640	462.322.640	0
03	Ditjen Perhubungan Darat	95.249.864	95.249.864	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	135.840.395	135.840.395	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	170.025.562	170.025.562	0
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1.260.500	1.260.500	0
13	Badan SAR Nasional	40.482.261	40.482.261	0
Jumlah		905.181.222	905.181.222	0

Tabel 18.
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
01	Sekretaris Jenderal	357.710.031	357.710.031	0
03	Ditjen Perhubungan Darat	18.681.000	18.681.000	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	204.162.810	204.162.810	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	273.539.687	273.539.687	0
Jumlah		854.093.528	854.093.528	0

C.2.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerima Rp 345,81 milyar

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) sebesar Rp 345.809.190.529,- dan sebesar Rp 77.772.063.669,-.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara, dan yang belum dipergunakan untuk kegiatan khususnya untuk penerimaan di luar mekanisme APBN.

Tabel 19.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per eselon I adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan/Penurunan
03	Ditjen Perhubungan Darat	107.190.000	38.886.004	68.303.996
04	Ditjen Perhubungan Laut	336.754.172.371	77.491.997.063	259.262.175.308
05	Ditjen Perhubungan Udara	427.609.486	241.180.602	186.428.884
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	8.520.218.672	0	8.520.218.672
Total		345.809.190.529	77.772.063.669	268.037.126.860

Tabel 20.

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2009

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
03	Ditjen Perhubungan Darat	38.886.004	38.886.004	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	77.491.997.063	77.491.997.063	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	241.180.602	241.180.602	0
Total		77.772.063.669	77.772.063.669	0

Tabel 21.
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
03	Ditjen Perhubungan Darat	107.190.000	107.190.000	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	336.754.172.371	336.754.172.371	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	427.609.486	427.609.486	0
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	8.520.218.672	7.185.000	8.513.033.672
		345.809.190.529	337.296.156.857	8.513.033.672

Pungutan yang belum dipergunakan di luar mekanisme APBN terdapat pada UPT/Satker di lingkungan BPSDM perhubungan sejumlah Rp.8.513.033.672,- yang tidak disetor ke kas Negara dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 22.
Pungutan Diluar Mekanisme APBN yang Belum Disetor ke Kas Negara

UPT/Satker	Saldo
Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia	541.106.970
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Medan	306.643.200
Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya	733.179.300
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Surabaya	1.739.416.000
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makasar	629.685.517
Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombang	628.043.050
Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Mauk	2.517.795.635
Sekolah Tinggi Transportasi Darat	1.316.063.500
Balai Diklat	28.000.000
Pusdiklat Udara	73.100.500
	8.513.033.672

C.2.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp 126,50
juta

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 126.491.895,- dan sebesar Rp 8.223.604.989,-. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai. Beberapa kemungkinan adanya kas pada Bendahara Pengeluaran dapat terjadi karena:

- a. Adanya pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke kas negara., meliputi:
 - 1) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca yang belum menerapkan Treasury National Pooling(TNP).
 - 2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca.
 - 3) Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung pada rekening Bendahara Pengeluaran.
 - 4) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas Negara.
Terhadap akun tersebut diinputkan dengan akun kredit Pendapatan yang Ditangguhkan (212411).
- b. Adanya **kewajiban satker kepada pihak lain**, yaitu: Jika ada Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran seperti uang honor atau SPPD yang belum dibagikan kepada pihak lain.
Terhadap akun tersebut diinputkan dengan akun kredit Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (211291).

Tabel 23.

Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I adalah sebagai berikut:

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
03	Ditjen Perhubungan Darat	244.127	0	244.127
04	Ditjen Perhubungan Laut	125.397.839	8.195.887.453	(8.070.489.614)
05	Ditjen Perhubungan Udara	849.929	27.717.536	(26.867.607)
Total		126.491.895	8.223.604.989	(8.097.113.094)

Tabel 24.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	2010	2009
Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	Rp 93.790.457	Rp 8.133.041.225
Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 32.701.438	Rp 90.563.764
Jumlah	Rp 126.491.895	Rp 8.223.604.989

Terhadap saldo kas lainnya dan setara kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas Negara atau telah dibayarkan kepada pihak lain setelah tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25.

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2009 ke kas negara

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
04	Ditjen Perhubungan Laut	8.123.440.889	8.123.440.889	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	9.600.336	9.600.336	0
		8.133.041.225	8.133.041.225	0

Tabel 26.

Pembayaran saldo kas per 31 Desember 2009 kepada pihak lain

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Pembayaran kepada pihak lain	Sisa Pembayaran kepada pihak lain
04	Ditjen Perhubungan Laut	72.446.564	72.446.564	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	18.117.200	18.117.200	0
		90.563.764	90.563.764	0

Tabel 27.

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 ke kas negara

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
03	Ditjen Perhubungan Darat	244.127	244.127	0
04	Ditjen Perhubungan Laut	92.696.401	92.696.401	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	849.929	849.929	0
	Total	93.790.457	93.790.457	0

Tabel 28.

Pembayaran saldo kas per 31 Desember 2010 kepada pihak lain

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Kas yang belum disetor ke
04	Ditjen Perhubungan Laut	32.701.438	32.701.438	0
	Total	32.701.438	32.701.438	0

C.2.4. Kas pada BLU

Kas pada
BLU Rp
93,304
milyar

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 93.038.372.556,- dan Rp 36.760.635.569,-. Terdapat kenaikan sebesar Rp 56.277.736.987,- Kas pada BLU ini merupakan saldo penerimaan kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan, terdapat pada 5 (lima) Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 29.

Besarnya Saldo Kas pada masing-masing BLU per 31 Desember 2010

No.	Badan Layanan Umum	Jumlah
1	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	22.710.082.374
2	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	42.833.281.555
3	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	10.270.749.313
4	Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar	16.471.195.817
5	Balai Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Tegal	753.018.497
	Jumlah	93.038.327.556

C.2.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang
Bukan Pajak
Rp 222,64
milyar

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 222.641.909.452,- dan sebesar Rp 574.528.376.904,

Tabel 30.

Piutang Bukan Pajak per eselon I, adalah sebagai berikut:

Kode	Eselon I	2010	2009	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	44.790.892	43.565.567	1.225.325
03	Ditjen Perhubungan Darat	4.815.840	0	4.815.840
04	Ditjen Perhubungan Laut	161.459.516.437	517.340.015.508	(355.880.499.071)
05	Ditjen Perhubungan Udara	60.604.044.283	56.928.795.829	3.675.248.454
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	528.742.000	216.000.000	312.742.000
	Total	222.641.909.452	574.528.376.904	(351.886.467.452)

Berdasarkan rekapitulasi umur piutang per 31 Desember 2010. Kualitas piutang pada Kementerian Perhubungan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 31.**Daftar Klasifikasi Piutang**

Klasifikasi	Jumlah (Rp)
Klasifikasi Lancar	61.149.843.802
Klasifikasi Kurang Lancar	10.116.646.946
Klasifikasi Diragukan	151.375.418.704
Total	222.641.909.452

Pada Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA 2010 (Audited), penyisihan piutang belum dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penyisihan piutang tersebut akan dilakukan pada Laporan Keuangan Tahun 2011.

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp 222.641.909.452,- dapat dijelaskan rekapitulasi umur piutang menurut eselon I adalah sebagai berikut;

Tabel 32.**Rekapitulasi Umur Piutang Tahun Anggaran 2010**

Kode	Eselon I	Umur Piutang				Saldo Piutang
		Belum Jatuh Tempo	1 Bulan	2 Bulan	> 3 Bulan	
01	Sekretaris Jenderal	12.241.679	0	0	32.549.213	44.790.892
03	Ditjen Perhubungan Darat	4.815.840	0	0	0	4.815.840
04	Ditjen Perhubungan Laut	0	10.116.646.946	0	151.342.869.491	161.459.516.437
05	Ditjen Perhubungan Udara	60.604.044.283	0	0	0	60.604.044.283
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	528.742.000	0	0	0	528.742.000
	Total	61.149.843.802	10.116.646.946	0	151.375.418.704	222.641.909.452

Saldo Piutang bukan pajak Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 44.790.892,- merupakan piutang yang berasal dari sewa rumah dinas satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Darat secara total per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 4.815.840,- merupakan pendapatan Jasa Bandar Udara Kepelabuhan dan Kenavigasian pada UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangu yang belum diterima oleh Bendahara Penerima sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 .

Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Laut per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 161.459.516.437,- merupakan pendapatan Jasa Bandar Udara Kepelabuhan dan Kenavigasian yang belum dibayar oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Piutang PNBPT, ASDP dan Perusahaan Pelayaran Swasta yang tergabung dalam DPP GAPASDAP menolak membayar PNBPT uang rambu dan kepelabuhan sebesar Rp. 17.010.662.355,47,- selama periode sebelum PP No. 6 tahun 2009 diberlakukan. Terkait hal ini Kementerian Perhubungan telah menyerahkan penanganan piutang ini kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Sedangkan piutang PNPB senilai ekuivalen Rp 10.858.984.229,- (terdiri dari USD 85.963,15 dan Rp. 10.128.297.454,-) yang belum dapat diidentifikasi wajib bayarnya Ditjen Hubla akan melakukan penelusuran bersama Unit Pelaksana Teknis.

Saldo Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Udara per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 60.604.044.283,- Merupakan saldo piutang penerimaan negara bukan pajak dari 21 (dua puluh satu) wilayah yang terdiri dari :

Tabel 33.

Saldo Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Udara per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebagai berikut:

Uraian Wilayah	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan / (penurunan)
Pusat	58,726,430,083	55,846,011,919	2,880,418,164
Sumatera Utara	65,291,230	116,653,500	(51,362,270)
Jawa Barat	3,732,000	0	3,732,000
Aceh	5,977,050	0	5,977,050
Riau	2,128,336	0	2,128,336
Lampung	89,875,255	0	89,875,255
Kalimantan Barat	21,103,210	12,554,700	8,548,510
Kalimantan Tengah	40,944,960	93,711,185	(52,766,225)
Kalimantan Timur	664,725,147	0	664,725,147
Sulawesi Tengah	2,948,098	4,425,020	(1,476,922)
Sulawesi Selatan	2,090,000	260,000	1,830,000
Sulawesi Tenggara	139,838,025	11,712,000	128,126,025
NTT	16,737,936	19,480,497	(2,742,561)
Maluku	37,027,619	0	37,027,619
Irian Jaya	442,137,845	521,482,450	(79,344,605)
Bengkulu	127,594,117	147,581,923	(19,987,806)
Maluku Utara	177,543,722	112,516,625	65,027,097
Bangka Belitung	28,154,350	0	28,154,350
Gorontalo	8,052,100	37,537,605	(29,485,505)
Kepulauan Riau	720,000	0	720,000
Sulawesi Barat	993,200	4,868,405	(3,875,205)
Total	60,604,044,283	56,928,795,829	3,675,248,454

Per 31 Desember 2010 Piutang Bukan Pajak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan senilai Rp. 528.742.000,- yang merupakan kewajiban dari PT. Mantrust Asahi Airways kepada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug yang akan dibayar setiap bulan senilai Rp. 18.000.000,- dengan sisa pembayaran selama 12 bulan. PIP Makassar sebesar Rp. 26.850.000,- merupakan pendapatan uang pendidikan yang belum diterima, dan dari STIP sebesar Rp. 285.892.000,- merupakan uang pendidikan yang belum diterima dan kerjasama perorangan.

C.2.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti**Rugi (TGR)**

BL TP/TGR
Rp 6,31
milyar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 6.308.896.481,- dan Rp 12.000.000,-.

Tabel 34.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I adalah sebagai berikut:

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
03	Ditjen Perhubungan Darat	488.455.104	0	488.455.104
04	Ditjen Perhubungan Laut	1.325.381.796	0	1.325.381.796
05	Ditjen Perhubungan Udara	206.575.620	12.000.000	194.575.620
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	4.288.483.961	0	4.288.483.961
Total		6.308.896.481	12.000.000	6.296.896.481

C.2.7. Uang Muka Belanja

Uang Muka
Belanja
Rp 3,37
milyar

Uang Muka Belanja per 31 Desember 2010 (Audited) adalah sebesar Rp 3.372.081.629,-.

Tabel 35.

Rincian Uang Muka Belanja per Eselon I adalah sebagai berikut:

Kode	Eselon I	31-Des-10
04	Ditjen Perhubungan Laut	49.500.000
05	Ditjen Perhubungan Udara	3.322.581.629
Total		3.372.081.629

Uang Muka Belanja pada Ditjen Perhubungan Laut atas transaksi uang muka sewa gedung pada kantor adpel malahayati sebesar Rp. 49.500.000,- yang belum dinikmati sewa gedung tersebut sampai dengan tanggal neraca.

Sedangkan uang muka belanja pada Ditjen Perhubungan Udara per 31 Desember 2010 atas sewa gedung dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 36.
Rincian Uang Muka Belanja Ditjen Perhubungan Udara
per 31 Desember 2010

Kode	Uraian Satker	31 Desember 2010
1	Kanto Pusat	2.857.047.160
2	Bandara Medan Baru	176.015.725
3	Adbandara Polonia	282.000.000
4	Bandara Aroepala	1.220.000
5	Bandara Andijema	6.298.744
	Total	Rp 3.322.581.629

C.2.8. Persediaan

Persediaan
Rp 1,05
trilyun

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 1.051.477.759.601,- dan sebesar Rp 865.608.291.112,-. Nilai Persediaan tersebut sudah termasuk Persediaan Badan Layanan Umum sebesar Rp 768.924.273,- yang terdapat pada 5 (lima) satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 37.
Rincian Persediaan per Eselon I adalah sebagai berikut:

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	211.007.785	53.098.388	157.909.397
02	Inspektorat Jenderal	110.886.675	37.095.905	73.790.770
03	Ditjen Perhubungan Darat	940.403.943.746	739.761.419.927	200.642.523.819
04	Ditjen Perhubungan Laut	66.175.838.681	75.186.196.868	(9.010.358.187)
05	Ditjen Perhubungan Udara	39.718.189.830	38.170.961.298	1.547.228.532
08	Ditjen Perkeretaapian	2.072.992.850	1.030.143.030	1.042.849.820
11	Badan Litbang Perhubungan	2.415.230	2.563.135	(147.905)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	2.013.560.531	2.925.167.268	(911.606.737)
13	Badan SAR Nasional	0	8.411.322.703	(8.411.322.703)
	Total	1.050.708.835.328	865.577.968.522	185.130.866.806

Nilai persediaan yang disajikan pada neraca per eselon I merupakan nilai berdasarkan hasil laporan keuangan masing-masing eselon I yang sudah dilakukan stock opname.

Tabel 38.
Rincian Persediaan masing-masing satker Badan Layanan Umum
adalah sebagai berikut:

BLU	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	60.990.175	30.322.590	30.667.585
Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peni	588.270.198	0	588.270.198
Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar	119.663.900	0	119.663.900
Total	768.924.273	30.322.590	738.601.683

Nilai persediaan Badan Layanan Umum yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil laporan keuangan masing-masing Badan Layanan Umum yang sudah dilakukan stock opname.

Tabel 39.
Daftar Persediaan per 31 Desember 2010

Uraian	2010	2009	Kenaikan/(Penurunan)
Barang Konsumsi	30.594.378.813	29.291.209.875	1.303.168.938
Amunisi	76.625.000	189.433.500	(112.808.500)
Bahan Untuk Pemeliharaan	2.003.851.505	1.611.602.419	392.249.086
Suku Cadang	53.532.912.304	43.382.254.034	10.150.658.270
Persediaan Untuk di Jual /diserahkan Kepada Masyarakat	899.117.488.011	737.952.628.641	161.164.859.370
Pita Cukai, Materai dan Leges	1.145.500	4.687.400	(3.541.900)
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	39.568.558.713	0	39.568.558.713
Bahan Baku	11.391.810.407	28.170.508.482	(16.778.698.075)
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	270.763.117	3.333.153.635	(3.062.390.518)
Persediaan lainnya	14.920.226.231	21.672.813.126	(6.752.586.895)
Jumlah	1.051.477.759.601	865.608.291.112	185.869.468.489

C.2.9. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp 76,95
trilyun.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 76.948.072.224.400,- dan sebesar Rp 62.272.469.719.509,-.

Tabel 40.

Posisi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	15.742.998.295.701	13.231.980.466.304	2.511.017.829.397
2	Peralatan dan Mesin	10.267.045.050.301	8.989.788.409.846	1.277.256.640.455
3	Gedung dan Bangunan	7.424.787.099.160	4.937.045.117.859	2.487.741.981.301
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.703.066.180.021	25.605.552.245.572	6.097.513.934.449
5	Aset Tetap Lainnya	1.909.275.829.328	931.260.205.631	978.015.623.697
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.900.899.769.889	8.576.843.274.297	1.324.056.495.592
	Jumlah	76.948.072.224.400	62.272.469.719.509	14.675.602.504.891

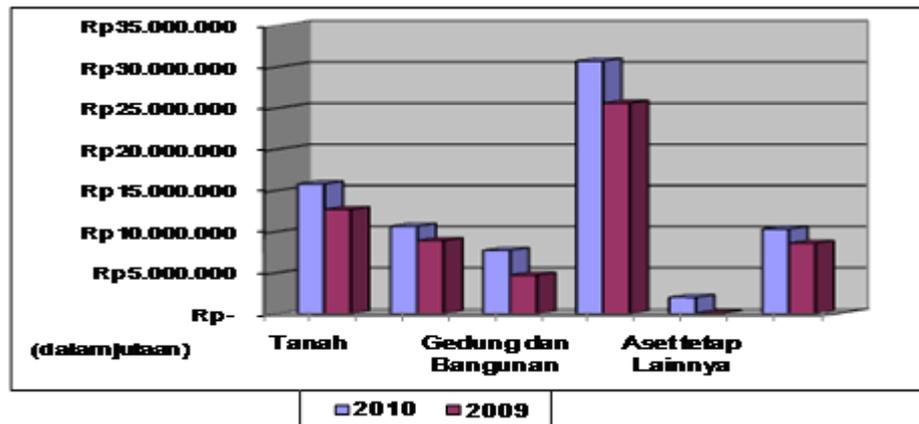
Posisi Aset tersebut sudah termasuk Aset Tetap yang ada pada 5 (lima) satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 1.874.904.413.521,- pada tahun 2010 dan sebesar Rp 905.250.409.547,- pada tahun 2009.

Tabel 41.

Posisi Aset Tetap Badan Layanan Umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	1.065.197.712.958	562.380.517.600	502.817.195.358
2	Peralatan dan Mesin	335.420.378.662	99.524.151.540	235.896.227.122
3	Gedung dan Bangunan	433.894.968.413	235.156.624.556	198.738.343.857
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.244.555.248	5.788.051.340	8.456.503.908
5	Aset Tetap Lainnya	4.861.299.540	2.401.064.511	2.460.235.029
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.285.498.700	-	21.285.498.700
	Jumlah	1.874.904.413.521	905.250.409.547	969.654.003.974

**Grafik 6.
Posisi Aset Tetap**



Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 42.

Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2010

No.	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK BMN	Selisih
1	Tanah	15.742.998.295.701	Rp 15.742.998.295.701	0
2	Peralatan dan Mesin	10.267.045.050.301	10.363.498.238.731	(96.453.188.430)
3	Gedung dan Bangunan	7.424.787.099.160	7.332.339.916.240	92.447.182.920
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.703.066.180.021	31.703.071.832.521	(5.652.500)
5	Aset Tetap Lainnya	1.909.275.829.328	690.722.016.827	1.218.553.812.501
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.900.899.769.889	9.896.899.769.799	4.000.000.090
	Jumlah	76.948.072.224.400	75.729.530.069.819	1.218.542.154.581

Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2010 pada Neraca terdapat perbedaan dengan SIMAK - BMN sebesar Rp 1.218.542.154.581,-. Posisi pada Neraca tercatat sebesar Rp 76.948.072.224.400,- sedangkan pada SIMAK - BMN tercatat sebesar Rp 75.729.530.069.819,-. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Peralatan dan Mesin selisih sebesar minus Rp 96.453.188.430,- pada ATKP Surabaya sebesar minus Rp 97.989.145.555,- dan Sekretariat BPSDM Perhubungan sebesar Rp 1.556.411.006,-. Perbedaan terjadi karena adanya kesalahan pencatatan, yang seharusnya Peralatan dan Mesin dicatat pada Gedung dan Bangunan, BPPTD Tegal sebesar minus Rp 65.479.679,- karena aset tetap peralatan dan mesin belum direklasifikasi ke aset lain-lain dan sebesar Rp 3.375.000,- seharusnya masuk peralatan dan mesin direklasifikasi ke gedung dan bangunan, PIP Semarang sebesar Rp 40.069.940,- dan ATKP Makassar sebesar Rp 1.580.858,- karena kesalahan aplikasi SIMAK-BMN.
- Gedung dan Bangunan selisih sebesar Rp 92.447.182.920,- terdapat pada ATKP Surabaya sebesar Rp 93.989.145.555,- dan Sekretariat BPSDM Perhubungan sebesar minus Rp 1.556.411.006,-. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan pencatatan, yang seharusnya Peralatan dan Mesin dicatat pada Gedung dan Bangunan dan BPPTD Tegal sebesar minus Rp 3.375.000,- seharusnya masuk peralatan dan mesin direklasifikasi ke gedung dan bangunan serta PIP Semarang sebesar Rp 17.823.371,- karena kesalahan aplikasi SIMAK-BMN.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan selisih sebesar Rp 4.000.000.090,- terdapat pada ATKP Surabaya sebesar Rp 4.000.000.000,-. Perbedaan tersebut karena adanya kesalahan pencatatan, yang seharusnya Peralatan dan Mesin dicatat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Pusdiklat Perhubungan Laut sebesar Rp 90,- karena selisih pembulatan.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan selisih sebesar minus Rp 5.652.500,- pada PIP Semarang karena kesalahan pada aplikasi SIMAK BMN.
- Aset Tetap Lainnya selisih sebesar Rp 1.218.553.812.501,-. Perbedaan tersebut terjadi karena untuk Aset Tetap Renovasi belum ada kodefikasi di dalam SIMAK BMN sehingga belum bisa direkam ke dalam aplikasi SIMAK BMN.

Tabel 43.

Berikut uraian atas perbedaan Aset Tetap Lainnya per eselon I adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Aset Tetap Lainnya 2010
01	Sekretariat Jenderal	Rp 864.850.000
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 51.275.769.330
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 8.919.012.197
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 1.155.688.779.770
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 1.805.401.204
Jumlah		Rp 1.218.553.812.501

Rincian perbedaan Aset Tetap Lainnya secara lengkap dapat disajikan sebagai berikut :

Ditjen Perhubungan Darat

Terdapat perbedaan pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 51.275.769.330,- karena ada pekerjaan rehabilitasi terminal dan dermaga pada beberapa Satuan Kerja yaitu :

Tabel 44.

Rincian Perbedaan Aset Tetap Lainnya Ditjen Perhubungan Darat

UPT/Satker	Aset Tetap Lainnya 2010
Satker Pengembangan LLAJ DIY	Rp 1.122.713.000
Satker Pengembangan LLAJ Maluku	Rp 755.480.000
Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Tengah	Rp 2.477.303.000
Standarisasi Perencanaan Jaringan dan Keselamatan Transportasi Darat	Rp 7.678.364.000
Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Utara	Rp 5.945.440.000
Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Tengah	Rp 735.933.000
Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Barat	Rp 31.149.905.080
Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Barat	Rp 451.212.000
Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Tengah	Rp 809.694.250
Satker Pengembangan LLASDP DIY	Rp 149.725.000
Jumlah	Rp 51.275.769.330

Ditjen Perhubungan Laut

Terdapat selisih pada Aset Tetap Lainnya antara neraca UAPPA-E1 dan SIMAK-BMN sebesar Rp. 8.919.012.197,-, dimana perbedaan tersebut disebabkan adanya pekerjaan pembangunan/renovasi aset gedung kantor dan pekerjaan pemasangan fender yang bukan merupakan aset Ditjen Perhubungan Laut namun merupakan aset PT. Pelindo yang dipinjam pakai oleh Ditjen Perhubungan Laut sebagai Kantor UPT (Adpel/Kanpel) Ditjen Perhubungan Laut. Sehingga tidak menambah nilai aset tetap pada Neraca SIMAK-BMN dan hanya dicatat pada Aset Tetap Neraca UAPPA-E1. Dimana selisih tersebut terdapat pembangunan/renovasi pada UPT sebagai berikut :

Tabel 45.

Tabel Selisih Aset Tetap Lainnya Ditjen Perhubungan Laut

NO	KODE KANTOR / NAMA KANTOR		PERBEDAAN		SELISIH
			SIMAK	SAKPA	
1			3	4	5
1	413018	ADMINISTRATOR PELABUHAN BELAWAN	917.000	224.610.996	(223.693.996)
2	412823	ADMINISTRATOR PELABUHAN SEMARANG	-	90.026.200	(90.026.200)
3	559470	KANTOR PELABUHAN BULI	27.550.000	4.669.650.000	(4.642.100.000)
4	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	93.811.184.529	93.873.433.530	(62.249.001)
5	412891	ADMINISTRATOR PELABUHAN TANJUNG PERAK, SURABAYA	250.000	1.409.128.000	(1.408.878.000)
6	652542	ADMINISTRATOR PELABUHAN BANDANAIRA	0	569.500.000	(569.500.000)
7	413670	ADMINISTRATOR PELABUHAN BANTEN	0	1.824.565.000	(1.824.565.000)
8	412854	KANTOR PELABUHAN JUWANA	0	98.000.000	(98.000.000)
JUMLAH			93.839.901.529	102.758.913.726	(8.919.012.197)

Ditjen Perhubungan Udara

Terdapat selisih pada akun Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. **1.155.688.779.770,-** disebabkan, terdapat aset tetap renovasi yang bukan miliknya, dimana penyajian pada Neraca Laporan Keuangan (SAK) dikelompokkan dan disajikan pada Aset Tetap Lainnya melalui Jurnal Neraca, sementara pada Laporan BMN tidak direkam pada aplikasi SIMAK-BMN karena secara historis saldo awal pencatatannya pada unit pemilik BMN. Rincian selisih Aset Tetap Lainnya adalah :

Tabel 46.**Tabel Selisih Aset Tetap Lainnya Ditjen Perhubungan Udara**

UPT/ Satker	Nilai	Jenis Belanja	Keterangan
Bandara Tjilik Riwut	1,712,000,000	Gedung Bangunan	Renovasi Terminal Haji
Bandara Hang Nadim	10.597.169.000	Jalan, Irigasi Jaringan	Overlay Landasan
Bandara Komodo	30,493,684,000	Jalan, Irigasi Jaringan	Land Clearing (Tanah Pemda)
Bandara Medan Baru	959.962.340.670	Jalan, Irigasi Jaringan	Land Clearing (Tanah PT.AP)
Bandara Pagar Alam	10,508,490,100	Jalan, Irigasi Jaringan	Land Clearing (Tanah Pemda)
Setditjen Perhubungan Udara	2.753.419.100	Gedung Bangunan	Renovasi Gedung Kantor Pusat
Dit Angud	188,801,800	Gedung Bangunan	Renovasi Gedung Kantor
Dit Keamanan Penerbangan	396,500,000	Gedung Bangunan	Renovasi Gedung Kantor
Dit Navigasi	482,539,000	Gedung Bangunan	Renovasi Gedung Kantor
Bandara Muara Bungo	116.707.284.800	Jalan, Irigasi Jaringan	Land Clearing (Tanah Pemda)
Bandara silangit	9.356.136.000	Jalan, Irigasi Jaringan	Land Clearing (Tanah Pemda)
Bandara aek godang	1,223,615,000	Jalan, Irigasi Jaringan	Land Clearing (Tanah Pemda)
Bandara aroepala selayar	166,870,000	Gedung Bangunan	Renovasi Gedung PK-PPK an. Bandara Pongtiku
Bandara Gewayantana	7.416.410.400	Jalan, Irigasi Jaringan	Land Clearing (Tanah Pemda)
Bandara Dobo	1.880.200.000	Jalan, Irigasi Jaringan	Land Clearing (Tanah Pemda)
Adbandara makassar	665,140,000	Jalan, Irigasi Jaringan	Land Clearing (Tanah Setditjen Hubud)
Bandara Adi Sucipto	1.178.179.900	Jalan, Irigasi Jaringan	Perbaikan runway strip di bandara gading
Total	1.155.688.779.770		

Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Terjadi selisih antara aset tetap lainnya dalam neraca dengan aset tetap lainnya dalam SIMAK BMN senilai Rp. 1.805.401.204-, merupakan Aset Tetap Renovasi pada Sekretariat BPSDM Perhubungan yang tidak dicatat pada aplikasi SIMAK-BMN namun tercatat pada aplikasi SAKPA karena gedung yang direnovasi merupakan milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

C.2.9.1 Tanah

Tanah
Rp 15.74
trilyun

Nilai tanah per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 15.742.998.295.701,- dan Rp 13.231.980.466.304,-. Nilai ini sudah termasuk nilai Tanah yang ada pada satker Badan Layanan Umum yang ada pada di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Mutasi Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :	
Saldo Awal	13.231.980.466.304
Penambahan Saldo Awal	92.984.680.099
Pembelian	11.937.242.289
Transfer Masuk	521.855.039.331
Hibah (Masuk)	200.000.000
Penyelesaian Pembangunan	78.023.928.999
Pembatalan Penghapusan	1.211.108.500
Reklasifikasi Masuk	41.743.000.000
Perolehan Lainnya	1.814.763.582
Pengembangan Nilai Aset	15.145.521.027
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	141.179.936.188
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	1.936.779.416.100
Pengembangan Melalui KDP	25.871.994.800
	Rp 16.100.727.097.219
Pengurangan	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(126.950.682.250)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	(4.097.872.736)
Penghapusan	(911.040.940)
Transfer Keluar	(55.741.500.000)
Reklasifikasi Keluar	(42.333.224.812)
Koreksi Pencatatan	(4.794.729.750)
Transfer Keluar Badan SAR Nasional	(122.899.751.030)
	Rp (357.728.801.518)
Jumlah	Rp 15.742.998.295.701

Tabel 47.

Rincian Tanah per Eselon I, adalah sebagai berikut:

Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
Sekretaris Jenderal	269.353.603.500	269.353.603.500	0
Ditjen Perhubungan Darat	495.331.713.669	530.522.908.607	(35.191.194.938)
Ditjen Perhubungan Laut	994.415.984.517	664.997.203.472	329.418.781.045
Ditjen Perhubungan Udara	11.529.559.345.906	10.377.188.185.090	1.152.371.160.816
Ditjen Perkeretaapian	1.085.129.075.934	374.493.883.572	710.635.192.362
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1.369.208.572.175	892.524.931.033	476.683.641.142
Badan SAR Nasional	0	122.899.751.030	(122.899.751.030)
Total	15.742.998.295.701	13.231.980.466.304	2.511.017.829.397

C.2.9.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp
10,27 trilyun

Nilai Peralatan dan mesin per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 10.267.045.050.301,- dan Rp 8.989.788.409.846,-. Nilai ini sudah termasuk nilai tanah yang ada pada satker Badan Layanan umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :	
Saldo Awal	8.989.788.409.846
Penambahan Saldo Awal	68.848.778.290
Pembelian	469.050.845.591
Transfer Masuk	942.704.714.528
Hibah (Masuk)	3.438.664.415
Penyelesaian Pembangunan	1.607.456.723.693
Reklasifikasi Masuk	741.259.290.079
Perolehan Lainnya	43.151.730
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	88.447.000
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks	618.154.384
Pengembangan Nilai Aset	22.439.577.076
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	45.629.563.116
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	3.365.294.681
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	6.000.000
Pengembangan Melalui KDP	68.493.015.338
Penghapusan	1.314.000
Koreksi Pencatatan	201.371.864
Koreksi Pencatatan	129.694.500
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	45.000
	Rp 12.963.563.055.131
Pengurangan	
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks Total	(740.000)
Pengurangan Nilai Aset Total	(33.510.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) Total	(100.520.799.162)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-) Total	(220.271.767.726)
Penghapusan Total	(8.419.540.919)
Transfer Keluar Total	(158.102.794.047)
Hibah (Keluar) Total	(291.826.053.872)
Reklasifikasi Keluar Total	(1.212.735.292.821)
Koreksi Pencatatan Total	(4.503.624.995)
Penghapusan semu karena reklasifikasi dar Total	(28.722.421)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Total	(6.300.011.178)
Transfer Keluar Badan SAR Nasional	(693.775.147.689)
	Rp (2.696.518.004.830)
Jumlah	Rp 10.267.045.050.301

Tabel 48.

Rincian Peralatan dan Mesin per Eselon I adalah sebagai berikut :

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09
01	Sekretaris Jenderal	200.572.370.211	168.765.509.381
02	Inspektorat Jenderal	13.949.679.240	11.697.697.580
03	Ditjen Perhubungan Darat	610.832.876.153	631.710.902.631
04	Ditjen Perhubungan Laut	3.038.360.174.049	2.763.726.230.541
05	Ditjen Perhubungan Udara	3.010.767.366.006	2.139.752.521.325
08	Ditjen Perkeretaapian	1.479.659.001.586	1.522.409.159.330
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1.898.300.574.176	12.551.359.880
11	Badan Litbang Perhubungan	14.603.008.880	1.045.399.881.489
13	Badan SAR Nasional		693.775.147.689
Total		10.267.045.050.301	8.989.788.409.846

C.2.9.3 Gedung dan Bangunan

Gedung &
Bangunan Rp
7,42 trilyun

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 7.424.787.099.160,- dan sebesar Rp.4.937.045.117.859,-. Nilai Gedung dan Bangunan ini sudah termasuk nilai Gedung dan Bangunan yang ada pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Mutasi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :		
Saldo Awal		4.937.045.117.859
Penambahan Saldo Awal Total		112.758.272.175
Pembelian Total		80.470.782.061
Transfer Masuk Total		1.342.509.940.321
Penyelesaian Pembangunan Total		1.180.714.549.857
Reklasifikasi Masuk Total		87.722.853.713
Perolehan Lainnya Total		909.945.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T Total		109.500.000
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Eks Total		1.887.415.516
Pengembangan Nilai Aset Total		63.104.128.964
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) Total		15.675.661.982
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) Total		149.227.503.058
Penerimaan Aset Tetap Renovasi Total		3.160.055.045
Pengembangan Melalui KDP Total		156.274.327.890
Penghapusan Total		1.323.200.000
	Rp	8.132.893.253.441
Pengurangan		
Pengurangan Nilai Aset Total		(1.059.319.060)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) Total		(27.778.777.488)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-) Total		(28.973.161.767)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) Total		0
Penghapusan Total		(8.719.689.063)
Transfer Keluar Total		(58.505.616.562)
Reklasifikasi Keluar Total		(426.419.413.796)
Koreksi Pencatatan Total		(15.976.720.671)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Total		(2.466.013.545)
Transfer Keluar Badan SAR Nasional		(138.069.247.279)
Koreksi Pencatatan		(138.195.050)
	Rp	(708.106.154.281)
Jumlah	Rp	7.424.787.099.160

Tabel 49.

Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I adalah sebagai berikut:

Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
Sekretaris Jenderal	362.914.105.222	350.574.672.722	12.339.432.500
Ditjen Perhubungan Darat	588.272.865.945	459.362.437.859	128.910.428.086
Ditjen Perhubungan Laut	1.292.353.236.434	992.072.600.777	300.280.635.657
Ditjen Perhubungan Udara	2.758.454.529.750	993.834.249.554	1.764.620.280.196
Ditjen Perkeretaapian	985.404.162.195	927.516.789.850	57.887.372.345
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1.437.388.199.614	1.075.615.119.818	361.773.079.796
Badan SAR Perhubungan		138.069.247.279	(138.069.247.279)
Total	7.424.787.099.160	4.937.045.117.859	2.487.741.981.301

C.2.9.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan Irigasi
dan Jaringan
Rp 31.70
trilyun

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 31.703.066.180.021,- dan Rp 25.605.552.245.572,- Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan ini sudah termasuk nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :	
Saldo Awal	25.605.552.245.572
Penambahan Saldo Awal Total	52.697.429.701
Pembelian Total	97.198.251.149
Transfer Masuk Total	430.078.190.134
Hibah (Masuk) Total	4.000.000
Penyelesaian Pembangunan Total	4.957.677.354.053
Reklasifikasi Masuk Total	2.130.170.576.738
Pengembangan Nilai Aset Total	77.474.460.295
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) Total	227.810.389.504
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) Total	215.066.814.547
Penerimaan Aset Tetap Renovasi Total	693.750.000
Pengembangan Melalui KDP Total	466.706.375.917
Koreksi Pencatatan	8.500.550
	Rp 34.261.138.338.160
Pengurangan	
Transfer Masuk Total	(366.532.000)
Pengurangan Nilai Aset Total	(180.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) Total	(145.902.167.989)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-) Total	(82.479.234.464)
Penghapusan Total	(29.802.547.630)
Transfer Keluar Total	(149.844.929.224)
Hibah (Keluar) Total	(79.715.142.440)
Reklasifikasi Keluar Total	(2.027.532.706.375)
Koreksi Pencatatan Total	(35.435.365.145)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Total	(318.609.000)
Transfer Keluar Badan SAR Perhubungan	(6.674.743.872)
	Rp (2.558.072.158.139)
Jumlah	Rp 31.703.066.180.021

Tabel 50.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Eselon I adalah sebagai berikut:

Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
Sekretaris Jenderal	11.042.049.242	6.641.940.242	4.400.109.000
Ditjen Perhubungan Darat	760.106.808.315	444.093.223.357	316.013.584.958
Ditjen Perhubungan Laut	4.490.723.885.466	2.973.028.961.092	1.517.694.924.374
Ditjen Perhubungan Udara	8.785.956.141.866	7.104.024.715.179	1.681.931.426.687
Ditjen Perkeretaapian	17.495.066.883.836	14.980.223.192.709	2.514.843.691.127
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	159.997.934.596	90.865.469.121	69.132.465.475
Badan Litbang Perhubungan	172.476.700	0	172.476.700
Badan SAR Nasional		6.674.743.872	(6.674.743.872)
Total	31.703.066.180.021	25.605.552.245.572	6.097.513.934.449

C.2.9.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya Rp
1,91 trilyun

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 1.909.275.829.328,- dan sebesar Rp 931.260.205.631,-. Nilai Aset Tetap Lainnya ini sudah termasuk nilai Aset Tetap Lainnya pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :	
Saldo Awal	931.260.205.631
Penambahan Saldo Awal Total	3.496.100.331
Pembelian Total	1.226.162.536.637
Transfer Masuk Total	51.928.214.474
Penyelesaian Pembangunan Total	11.305.715.100
Reklasifikasi Masuk Total	5.648.995.031
Pengembangan Nilai Aset Total	11.055.230.906
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) Total	314.088.583
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+) Total	259.999
	Rp 2.241.171.346.692
Pengurangan	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) Total	(18.028.290.319)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-) Total	(46.382.540)
Penghapusan Total	(163.548)
Transfer Keluar Total	(48.975.000)
Reklasifikasi Keluar Total	(73.639.995.200)
Koreksi Pencatatan Total	(618.651.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Total	(91.840.131)
Transfer Keluar Badan SAR Perhubungan	(8.324.918.533)
Koreksi Pencatatan	(231.096.301.093)
	Rp (331.895.517.364)
Jumlah	Rp 1.909.275.829.328

Tabel 51.

Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I adalah sebagai berikut:

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	4.548.482.481	4.286.759.081	261.723.400
02	Inspektorat Jenderal	163.636.785	163.636.785	0
03	Ditjen Perhubungan Darat	85.368.155.773	69.709.669.329	15.658.486.444
04	Ditjen Perhubungan Laut	55.158.229.404	103.188.441.510	(48.030.212.106)
05	Ditjen Perhubungan Udara	1.242.282.597.306	224.115.415.643	1.018.167.181.663
08	Ditjen Perkeretaapian	493.834.240.841	500.300.133.873	(6.465.893.032)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	26.930.861.552	20.031.475.938	6.899.385.614
11	Badan Litbang Perhubungan	989.625.186	1.139.754.939	(150.129.753)
13	Badan SAR	0	8.324.918.533	(8.324.918.533)
	Total	1.909.275.829.328	931.260.205.631	978.015.623.697

C.2.9.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 9,9 trilyun

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 9.900.899.769.889,- dan Rp 8.576.843.274.297,-. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini sudah termasuk Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 52.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan menurut Jenisnya adalah sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan	31-Des-10
Tanah Dalam Pengerjaan	168.172.346.832
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	2.464.372.801.119
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2.843.048.982.576
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	4.319.192.672.633
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	106.112.966.729
Total	9.900.899.769.889

Tabel 53.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

KDP	31-Des-09	Penambahan	KDP Yang Menjadi Aset Definitif	Transfer Keluar Basarnas	31-Des-10
Tanah Dalam Pengerjaan	113.611.071.077	134.378.742.463	79.817.466.708	0	168.172.346.832
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1.342.555.225.119	3.029.103.772.666	1.809.138.734.686	98.147.461.980	2.464.372.801.119
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2.738.549.768.450	1.263.687.573.993	1.103.964.603.842	55.223.756.025	2.843.048.982.576
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	4.274.587.024.922	5.293.987.155.090	5.238.489.004.381	10.892.502.998	4.319.192.672.633
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	107.540.184.729	68.245.497.330	69.689.151.330	(16.436.000)	106.112.966.729
Total	8.576.843.274.297	9.789.402.741.542	8.301.098.960.947	164.247.285.003	9.900.899.769.889

Tabel 54.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per eselon I adalah sebagai berikut :

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
03	Ditjen Perhubungan Darat	2.458.437.478.462	2.084.899.063.856	373.538.414.606
04	Ditjen Perhubungan Laut	3.751.982.558.676	3.490.371.022.239	261.611.536.437
05	Ditjen Perhubungan Udara	889.327.702.929	1.326.365.949.810	(437.038.246.881)
08	Ditjen Perkeretaapian	1.605.738.872.089	1.035.720.168.596	570.018.703.493
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1.195.413.157.733	486.059.801.791	709.353.355.942
13	Badan SAR Nasional	0	153.427.268.005	(153.427.268.005)
Total		9.900.899.769.889	8.576.843.274.297	1.324.056.495.592

C.2.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp 1,34 trilyun

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 1.335.377.937.585,- dan sebesar Rp 931.512.580.705,-

Tabel 55.

Rincian Aset Lainnya per Eselon I adalah sebagai berikut :

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	97.901.634.322	76.285.089.655	21.616.544.667
02	Inspektorat Jenderal	1.353.891.000	1.100.307.000	253.584.000
03	Ditjen Perhubungan Darat	307.748.321.147	230.048.462.313	77.699.858.834
04	Ditjen Perhubungan Laut	219.206.018.684	93.484.951.883	125.721.066.801
05	Ditjen Perhubungan Udara	188.135.113.509	153.920.224.373	34.214.889.136
08	Ditjen Perkeretaapian	253.694.843.573	184.148.547.321	69.546.296.252
11	Badan Litbang Perhubungan	181.001.677.588	140.411.353.882	40.590.323.706
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	86.336.437.762	50.007.160.169	36.329.277.593
13	Badan SAR Nasional	0	2.106.484.109	(2.106.484.109)
Total		1.335.377.937.585	931.512.580.705	403.865.356.880

Tabel 56.

Aset Lainnya Menurut Jenisnya adalah sebagai berikut :

Aset Lainnya	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
Tagihan Penjualan Angsuran	0	216.000.000	0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	489.841.857	564.990.854	(75.148.997)
Aset Tak Berwujud	1.190.668.823.626	905.801.469.296	284.867.354.330
Aset Lain-lain	144.219.272.102	24.930.120.555	119.289.151.547
Total	1.335.377.937.585	931.512.580.705	403.865.356.880

C.2.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp 0

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 0 dan Rp 216.000.000,-. Saldo sebesar Rp 216.000.000,- pada tahun 2009 terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu atas Tagihan Penjualan Angsuran kepada PT. Mantrus Airways yang pada tahun 2010 telah direklasifikasi ke dalam aset lancar yang akan dilunasi atau dibayar sampai dengan 31 Desember 2011.

C.2.12 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan
Perbendaharaan /

Tuntutan Ganti
Rugi Rp
489,84 juta

Nilai Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 489.841.857,- dan Rp.564.990.854,-.

Tabel 57.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I adalah sebagai berikut :

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	468.347.211	160.586.781	307.760.430
05	Ditjen Perhubungan Udara	21.494.646	404.404.073	(382.909.427)
	Total	489.841.857	564.990.854	(75.148.997)

C.2.13 Aset Tak Berwujud

Aset tak
Berwujud Rp
1,19 trilyun

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 1.190.668.823.626,- dan sebesar Rp 905.801.469.296,-. Nilai aset tak berwujud tersebut sudah termasuk Aset Tak Berwujud pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 15.999.395.216,- dan Rp 937.453.000,-.

Tabel 58.**Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I adalah sebagai berikut:**

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	97.867.763.972	75.980.533.225	21.887.230.747
02	Inspektorat Jenderal	1.353.891.000	1.100.307.000	253.584.000
03	Ditjen Perhubungan Darat	306.017.891.727	230.046.305.313	75.971.586.414
04	Ditjen Perhubungan Laut	91.108.374.219	75.473.739.484	15.634.634.735
05	Ditjen Perhubungan Udara	179.664.087.614	149.525.088.229	30.138.999.385
08	Ditjen Perkeretaapian	253.585.190.073	184.038.893.821	69.546.296.252
11	Badan Litbang Perhubungan	180.986.114.588	140.395.790.882	40.590.323.706
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	80.085.510.433	48.850.036.342	31.235.474.091
13	Badan SAR	0	390.775.000	(390.775.000)
Total		1.190.668.823.626	905.801.469.296	284.867.354.330

Tabel 59.**Rincian Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut :**

BLU	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	2.132.029.716	937.453.000	1.194.576.716
Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar	12.715.553.900	0	12.715.553.900
Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	1.003.811.600	0	1.003.811.600
Balai Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Tegal	148.000.000	0	148.000.000
Total	15.999.395.216	937.453.000	15.061.942.216

C.2.14 Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain
Rp 144,22
milyar

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 144.219.272.102,- dan sebesar Rp 24.930.120.555,-. Aset lain-lain ini adalah aset tetap yang dihentikan penggunaannya karena menunggu SK Penghapusan dari Menteri Keuangan. Terdapat perbedaan Aset lain-lain antara Neraca dengan SIMAK-BMN sebesar Rp 65.601.471,-. Perbedaan tersebut terjadi karena pada SIMAK-BMN belum direklasifikasi dari aset tetap ke aset yang dihentikan penggunaannya yang terdapat pada BPPTD Tegal.

Tabel 60.**Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I adalah sebagai berikut :**

Kode	Eselon I	2010	2009	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	33.870.350	304.556.430	(270.686.080)
03	Ditjen Perhubungan Darat	1.730.429.420	2.157.000	1.728.272.420
04	Ditjen Perhubungan Laut	127.629.297.254	17.850.625.618	109.778.671.636
05	Ditjen Perhubungan Udara	8.449.531.249	3.990.732.071	4.458.799.178
08	Ditjen Perkeretaapian	109.653.500	109.653.500	0
11	Badan Litbang Perhubungan	15.563.000	15.563.000	0
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	6.250.927.329	941.123.827	5.309.803.502
13	Badan SAR	0	1.715.709.109	(1.715.709.109)
	Total	144.219.272.102	24.930.120.555	119.289.151.547

Aset Lain-Lain ini adalah hasil reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya diharapkan dalam waktu dekat akan diajukan penghapusannya kepada pengelola barang.

KEWAJIBAN**Kewajiban Jangka Pendek****C.2.15 Utang kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 139,73 milyar

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 139.725.858.192,- dan Rp 8.944.418.112,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek.

Tabel 61.**Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I adalah sebagai berikut:**

Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
Inspektorat Jenderal	3.239.500	0	3.239.500
Ditjen Perhubungan Darat	25.228.221	0	25.228.221
Ditjen Perhubungan Laut	106.470.644.388	72.446.564	106.398.197.824
Ditjen Perhubungan Udara	13.143.787.978	101.897.523	13.041.890.455
Ditjen Perkeretaapian	31.058.165	8.770.074.025	(8.739.015.860)
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	20.051.899.940	0	20.051.899.940
Total	139.725.858.192	8.944.418.112	130.781.440.080

C.2.16 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp 12,25 juta.

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2010 (Audited) adalah sebesar Rp 12.249.090,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Barang/Jasa yang harus diserahkan. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka ini terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara terdapat pada Bandara Cakrabuana dan Bandara Hanandjoeddin atas pendapatan sewa ruangan pihak ketiga yang belum diberikan jasa layanannya.

C.2.17 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN Rp
854,01 juta

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 854.093.528,- dan Rp 905.181.222,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel 62.

Rincian Uang Muka dari KPPN per Eselon I adalah sebagai berikut:

Eselon I	2010	2009	Kenaikan / (penurunan)
Sekretaris Jenderal	357.710.031	462.322.640	(104.612.609)
Ditjen Perhubungan Darat	18.681.000	95.249.864	(76.568.864)
Ditjen Perhubungan Laut	204.162.810	135.840.395	68.322.415
Ditjen Perhubungan Udara	273.539.687	170.025.562	103.514.125
Badan Pengembangan SDM Per	0	1.260.500	(1.260.500)
Badan SAR Nasional	0	40.482.261	(40.482.261)
Total	854.093.528	905.181.222	(51.087.694)

C.2.18 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp 345,90
milyar

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah Rp 345.903.360.986,- dan Rp 85.905.104.894,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Di Bendahara Penerimaan.

Tabel 63.

Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan per Eselon I adalah sebagai berikut:

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
03	Ditjen Perhubungan Darat	107.434.127	38.886.004	68.548.123
04	Ditjen Perhubungan Laut	336.847.248.772	85.615.437.952	251.231.810.820
05	Ditjen Perhubungan Udara	428.459.415	250.780.938	177.678.477
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	8.520.218.672	0	8.520.218.672
	Total	345.903.360.986	85.905.104.894	259.998.256.092

EKUITAS**Ekuitas Dana Lancar****C.2.19 Cadangan Piutang**

Cadangan
Piutang
Rp.228,95
milyar

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 228.950.805.933,- dan Rp 574.540.376.904,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, dan Uang Muka Belanja.

Tabel 64.

Rincian Cadangan Piutang per Eselon I adalah sebagai berikut :

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	44.790.892	43.565.567	1.225.325
03	Ditjen Perhubungan Darat	493.270.945	0	493.270.945
04	Ditjen Perhubungan Laut	162.784.898.232	517.340.015.508	(354.555.117.276)
05	Ditjen Perhubungan Udara	60.810.619.903	56.940.795.829	3.869.824.074
12	Badan Pengembangan SDM Perhubun	4.817.225.961	216.000.000	4.601.225.961
	Total	228.950.805.933	574.540.376.904	(345.589.570.971)

C.2.20 Cadangan Persediaan

Cadangan
Persediaan
Rp 1,05 trilyun

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 1.051.477.759.601,- dan Rp 865.608.291.112,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan.

Tabel 65.

Rincian Cadangan Persediaan per Eselon I, adalah sebagai berikut :

Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
Sekretaris Jenderal	211.007.785	53.098.388	157.909.397
Inspektorat Jenderal	110.886.675	37.095.905	73.790.770
Ditjen Perhubungan Darat	940.403.943.746	739.761.419.927	200.642.523.819
Ditjen Perhubungan Laut	66.175.838.681	75.186.196.868	(9.010.358.187)
Ditjen Perhubungan Udara	39.718.189.830	38.170.961.298	1.547.228.532
Ditjen Perkeretaapian	2.072.992.850	1.030.143.030	1.042.849.820
Badan Litbang Perhubungan	2.415.230	2.563.135	(147.905)
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	2.782.484.804	2.955.489.858	(173.005.054)
Badan SAR Nasional	0	8.411.322.703	(8.411.322.703)
Total	1.051.477.759.601	865.608.291.112	185.869.468.489

C.2.21 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang
harus
Disediakan
untuk
Pembayaran
Utang Jangka
Pendek
Rp 139,69
milyar

Nilai Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebesar minus Rp 139.693.536.754,- dan minus Rp 8.853.854.348,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dan Pendapatan Diterima Dimuka. Terdapat perbedaan nilai antara akun utang pihak ketiga dengan akun dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

pada neraca per 31 Desember 2010 sebesar Rp 32.321.438,-. Saldo utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 139.725.858.192,- sedangkan saldo dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar minus Rp 139.693.536.754,-. Perbedaan tersebut terjadi karena akun utang kepada pihak ketiga selain sebagai penyeimbang akun dana yang harus disediakan untuk pembayaran juga sebagai penyeimbang akun kas lainnya setara kas yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga setelah tanggal neraca.

Tabel 66.

Rincian Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek adalah sebagai berikut :

Barang / Jasa yang masih harus diserahkan Rp.12,25 juta

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
02	Inspektorat Jenderal	(3.239.500)	0	(3.239.500)
03	Ditjen Perhubungan Darat	(25.228.221)	0	(25.228.221)
04	Ditjen Perhubungan Laut	(106.438.322.950)	0	(106.438.322.950)
05	Ditjen Perhubungan Udara	(13.143.787.978)	(83.780.323)	(13.060.007.655)
08	Ditjen Perkeretaapian	(31.058.165)	(8.770.074.025)	8.739.015.860
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	(20.051.899.940)	0	(20.051.899.940)
Total		(139.693.536.754)	(8.853.854.348)	(130.839.682.406)

Barang / Jasa yang masih harus diserahkan Rp.3,37 milyar

C.2.22 Barang / Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa yang masih harus diserahkan per 31 Desember 2010 (Audited) adalah minus Rp 12.249.090,-. Akun tersebut merupakan akun penyeimbang akun pendapatan diterima dimuka yang terdapat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

C.2.23 Barang / Jasa yang Masih Harus Diterima

Nilai Barang/Jasa yang masih harus diterima per 31 Desember 2010 (Audited) adalah minus Rp 3.372.081.629,-. Akun tersebut merupakan akun penyeimbang akun uang muka belanja.

Tabel 67.

Rincian Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut :

Kode	Eselon I	31-Des-10
04	Ditjen Perhubungan Laut	49.500.000
05	Ditjen Perhubungan Udara	3.322.581.629
Total		3.372.081.629

C.2.24 Dana Lancar BLU

Dana Lancar
BLU Rp
93,04 milyar

Nilai Dana Lancar BLU per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 93.038.372.556,- dan Rp 36.760.635.569,-. Perkiraan tersebut merupakan penyeimbang Akun Kas pada Badan Layanan Umum yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Ekuitas Dana Investasi**C.2.25 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap**

Diinvestasikan
Dalam Aset
Tetap Rp
76,95 trilyun

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 76.948.072.224.401,- dan Rp 62.272.469.719.509,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap.

Tabel 68.

Rincian Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per eselon I adalah sebagai berikut:

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	848.430.610.656	799.622.484.926	48.808.125.730
02	Inspektorat Jenderal	14.113.316.025	11.861.334.365	2.251.981.660
03	Ditjen Perhubungan Darat	4.998.349.898.317	4.220.298.205.639	778.051.692.678
04	Ditjen Perhubungan Laut	13.622.994.068.546	10.987.384.459.631	2.635.609.608.915
05	Ditjen Perhubungan Udara	28.216.347.683.763	22.165.281.036.601	6.051.066.647.162
08	Ditjen Perkeretaapian	23.144.832.236.481	19.340.663.327.930	3.804.168.908.551
11	Badan Litbang Perhubungan	15.765.110.766	13.691.114.819	2.073.995.947
12	Badan Pengembangan SDM P	6.087.239.299.846	3.610.496.679.190	2.476.742.620.656
13	Badan SAR Nasional	0	1.123.171.076.408	(1.123.171.076.408)
Total		76.948.072.224.400	62.272.469.719.509	14.675.602.504.891

C.2.26 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan
Dalam Aset
Lainnya
Rp 1.34 trilyun

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 (Audited) adalah sebesar Rp 1.335.377.937.585,- dan Rp 931.512.580.705,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Lainnya.

Tabel 69.

Rincian Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per Eselon I adalah sebagai berikut :

Kode	Eselon I	31-Des-10	31-Des-09	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretaris Jenderal	97.901.634.322	76.285.089.655	21.616.544.667
02	Inspektorat Jenderal	1.353.891.000	1.100.307.000	253.584.000
03	Ditjen Perhubungan Darat	307.748.321.147	230.048.462.313	77.699.858.834
04	Ditjen Perhubungan Laut	219.206.018.684	93.484.951.883	125.721.066.801
05	Ditjen Perhubungan Udara	188.135.113.509	153.920.224.373	34.214.889.136
08	Ditjen Perkeretaapian	253.694.843.573	184.148.547.321	69.546.296.252
12	Badan Pengembangan SDM P	86.336.437.762	50.007.160.169	36.329.277.593
11	Badan Litbang Perhubungan	181.001.677.588	140.411.353.882	40.590.323.706
13	Badan SAR Nasional	-	2.106.484.109	(2.106.484.109)
Total		1.335.377.937.585	931.512.580.705	403.865.356.880

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan
Penting
Lainnya

A. HASIL TIM KEPPRES 13

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah melaksanakan inventarisasi dan penilaian atas Barang Milik Negara pada kantor/Satker dilingkungan Kementerian Perhubungan disajikan dalam Tabel 70 :

Tabel 70.
Rekapitulasi hasil inventarisasi Aset oleh Tim Keppres 13

Eselon 1	Jumlah UPT	Telah dilakukan Inventarisasi dan Terbit Berita Acara	Telah dilakukan Inventarisasi tapi Belum terbit Berita Acara
Sekretariat Jenderal	18	18	1
Inspektorat Jenderal	1	1	0
Ditjen Perhubungan Darat	83	85	2
Ditjen Perhubungan Laut	326	333	18
Ditjen Perhubungan Udara	178	126	15
Ditjen Perkeretaapian	24	21	0
Badan Litbang Perhubungan	5	5	0
Badan Diklat Perhubungan	24	23	0
	659	612	36

Penyebab perbedaan nilai antara data Tim Penertiban Aset dengan data Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak seluruh nilai Tim Penertiban Aset diinput ke dalam aplikasi SIMAK BMN ke dalam transaksi koreksi nilai Tim Penertiban Aset (205), melainkan masuk ke dalam transaksi saldo awal dan koreksi pencatatan nilai / kuantitas.
- 2) Dari hasil penelitian data Tim Penertiban Aset diperoleh hasil bahwa terdapat Satker / UPT yang secara struktur organisasi akuntansi bukan Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA-022), melainkan di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.
- 3) UPT / Satker Basarnas yang sudah tidak lagi tercatat dalam pencatatan koreksi Tim Penertiban Aset Kementerian Perhubungan.
- 4) Terdapat Satker sementara yang sudah tergabung pencatatan BMNnya dengan unit Eselon I-nya.

B. Evaluasi Permenhub 66 Tahun 2010

Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 66 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor / Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tindak Lanjut Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan, meliputi :

- 1) Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Piutang, Persediaan, Stock Opname Persediaan dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Barang / Belanja terkait penambahan aset dalam Neraca;
 - 2) Petunjuk Akuntansi Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran, Petunjuk akuntansi Kewajiban / Utang;
 - 3) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor / Satuan Kerja
- Sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan nomor KM 66 Tahun 2010 ini telah dilakukan kepada para pelaksana / petugas SAI (SAK dan SIMAK BMN) tingkat UAPPA-W dan beberapa Kantor / Satker Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap I tanggal 1 s.d 3 Desember 2010 dan tahap II tanggal 14 s.d. 16 Desember 2010.

Ke depan akan dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada Kantor / Satker lainnya dan harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

C. CATATAN PENTING PER ESELON I

1. DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Beberapa hambatan/kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan antara lain :

- a) Pemahaman dalam penginputan data masih kurang (perbedaan antara perolehan baru atas aset dengan pengembangan aset)
- b) Pemahaman basis akrual yang masih belum banyak diketahui oleh UPT/Satker
- c) Aplikasi yang bermasalah dalam hal restore, back-up, update versi dan pengiriman dari persediaan ke SIMAK, maupun dari SIMAK ke SAKPA dan terjadi serangan dari virus komputer
- d) Rincian data dukung yang masuk di aset lancar masih kurang
- e) Temuan BPK atas koreksi Saldo kas bendahara penerima dan piutang sudah diturunkan ke masing2 wilayah dan UPT, namun ketika melakukan rekonsiliasi data yang dibawa merupakan data yang belum terkoreksi.
- f) Data hasil rekon dengan KPKNL berbeda dengan data semester I yang diserahkan ke wilayah saat rekon dengan unit eselon I
- g) Saldo awal hasil koreksi dari KPKNL berbeda dengan saldo awal Audited BPK
- h) Masih ditemukannya perbedaan penambahan nilai aset (kelebihan) terhadap realisasi belanja modal, namun angka tersebut telah direkon oleh KPKNL, maka harus dilakukan penyesuaian meskipun telah dilakukan rekon dengan KPKNL jadi dapat disimpulkan bahwa data hasil rekonsiliasi di KPKNL belum mencerminkan data UPT/Satker yang sebenarnya.

2. DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Sebagai tindak lanjut atas temuan BPK tentang penerimaan yang berasal dari penyelenggaraan kebandarudaraan di UPT Bandar Udara Hang Nadim Batam yang seluruhnya diambil Otorita Batam tanpa ada kejelasan kontribusi sedikitpun kepada Ditjen Perhubungan Udara selaku yang memiliki UPT Bandara Hang Nadim, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengirimkan surat nomor: AU/01116/keu.085/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 bahwa sambil menunggu penetapan dari Menteri Koordinator

EKUIN, maka pendapatan yang diperoleh Bandar Udara Hang Nadim Batam diminta untuk disetorkan ke kas negara terhitung mulai 1 Januari 2011 berdasarkan jenis pelayanan yaitu :

- a) Pelayanan jasa penerbangan (PJP) domestik dan internasional;
- b) Pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);
- c) Pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U);
- d) Pas Bandar Udara.

3. DITJEN PERKERETAAPIAN

Ditjen Perkeretaapian masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap diantaranya :

- a) Permasalahan pengadaan tanah/pembebasan antara lain :
 - 1) Tanah yang belum selesai pembebasannya di satker Sumsel senilai Rp. 1.902.251.082,-. Sesuai surat permohonan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Perkeretaapian Sumsel No.S.006/K/SATKER SS/II/2009 Tgl. 6 Januari 2009 kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Ogan Ilir yang ditembuskan ke Pengadilan Negeri Ogan Ilir agar uang tersebut dikembalikan ke Pemerintah dan Surat Permohonan No. S.565/K/SATKER SS/XI/2009 Tgl. 7 Desember 2009 kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan BPN Kabupaten Ogan Ilir agar tanah tersebut dapat diproses sertifikasinya.
 - 2) Masih terdapat permasalahan pembebasan tanah dan sertifikasi tanah hasil oembebasan pada Satker Pembangunan Double-Double Track
 - 3) UPT Terminal Peti Kemas Gedebage Bandung. Terdapat permasalahan tanah di Pasoso yang masih belum ada kesepakatan harga dengan masyarakat setempat dengan UPT Terminal Peti Kemas Gedebage Bandung.
- b) Pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan rel beberapa satker belum dapat diselesaikan karena masih adanya hambatan pada ketersediaan rel.

Selain hal tersebut dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara masih terdapat hambatan/kendala antara lain :

- 1) Kurang patuhnya beberapa satker menyampaikan laporan keuangan tepat waktu secara berjenjang baik SAK maupun Simak-BMN sehingga menyulitkan penggabungan pada tingkat Eselon I
- 2) Kurang sempurnanya aplikasi sehingga masih terdapat permasalahan dalam pengaplikasian sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap penyelesaian laporan keuangan
- 3) Terdapat kegiatan Satker yang Multiyear diantaranya yaitu pada Satker Pembangunan Double-Double Track dan Satker Pembangunan Jalur Ganda Tanah Abang-Serpong-Maja.
- 4) Masih banyaknya aset Ditjen Perkeretaapian yang belum diinventarisasi sehingga perlu penanganan khusus untuk menginventarisir kembali aset pemerintah baik mengenai tanah, sarana dan prasarana perkeretaapian
- 5) Kurangnya pengungkapan pelaksanaan dan hambatan pada Catatan atas Laporan Keuangan (baik CaLK LRA, CaLK Neraca maupun CaLK BMN) baik tingkat Satker/Kantor dan tingkat Wilayah sehingga menyulitkan pengungkapan pada tingkat Eselon I
- 6) Terdapat beberapa satker yang belum melakukan rekonsiliasi dengan KPPN VI untuk realisasi dana Pinjaman Luar Negeri yang dikelolanya
- 7) Masih sering terjadi keterlambatan informasi dari KPPN VI (Khusus) kepada Satker penerima pinjaman luar negeri terhadap bukti Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan (SP3) yang telah terbit pada akhir bulan Desember sehingga Satker yang sebelumnya telah melaksanakan rekonsiliasi akhir tahun anggaran kembali melakukan rekonsiliasi ulang kepada KPPN VI (Khusus) yang berdampak pada perubahan Realisasi, Neraca serta CaLK pada Satker dan Eselon I.

4. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Hingga tahun 2010 telah ditetapkan 5 (lima) Satker yang telah ditetapkan sebagai satker BLU, yaitu :

- a) STIP Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK.05/2009 tanggal 5 Pebruari 2009;
- b) BP3IP Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7/KMK.05/2009 tanggal 19 Januari 2009;

- c) PIP Makassar Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 509/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009;
- d) PIP Semarang Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009;
- e) BP2TD Tegal Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 285/KMK.05/2010 tanggal 12 Juli 2010.

Dari 5 (lima) Satker yang sudah ditetapkan menjadi BLU, 4 (empat) diantaranya, Laporan Keuangan yang dibuat sedang dalam proses pemeriksaan oleh auditor eksternal (KAP). Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Audited (*Auditor Report Independent*) kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 31 Mei 2011 yaitu : STIP Jakarta, BP3IP Jakarta, PIP Makassar dan PIP Semarang. Sedangkan BP2TD Tegal belum dapat menyajikan laporan keuangan audited karena DIPA BLU belum mendapat persetujuan dari KPPN setempat.

Sampai dengan Laporan Keuangan ini dibuat jumlah UPT/Satker BPSDM Perhubungan yang sudah disetujui menjadi Satker BLU berjumlah 7 (tujuh), dengan sudah disetujuinya BP2IP Surabaya dan ATKP Surabaya yang mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan pada tahun 2011.

D. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

1. DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

- Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Negara pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi sebesar Rp. 38.886.004,- penerimaan tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 04 Pebruari 2010 (copy bukti setor terlampir).
- Temuan pada Tahun 2008 yaitu Hasil Pengadaan akan diserahkan kepada pihak ketiga (masyarakat dan Pemda) baik dari Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial dicatat sebagai Aset Tetap (temuan terhadap pencatatan atas Aset Tetap), sementara temuan tahun 2009 adalah Belanja Aset Tetap (dimaksudkan untuk dioperasionalkan atau dibagikan kepada pihak ketiga) direalisasikan dari belanja modal (temuan terhadap penganggaran). Untuk menengahi kedua hasil temuan tersebut

telah di tindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4320/KU.006/DRJD/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perlakuan (Treatment) Akuntansi Terhadap Hasil Pekerjaan Belanja Modal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Treatment akuntansi tersebut digunakan sambil menunggu terbentuknya UPT di lingkungan perhubungan darat (posisi saat ini masih dalam pembahasan di Kementerian PAN).

- Inventarisasi dan/atau Revaluasi Aktiva Tetap pada Kementerian Perhubungan Belum Selesai, 21 Satker yang masih dalam proses inventarisasi (Pengembangan LLAJ Irijabar) dan Hasil Inventarisasi aset Tim Kepres 13 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Satker / UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sampai dengan Laporan BMN Semester I TA. 2010 telah selesai secara keseluruhan, yaitu sebanyak 85 Satker / UPT. Rencana tindak lanjut setelah Inventarisasi dan revaluasi tersebut adalah melakukan penyesuaian pencatatan nilai aset dalam SIMAK-BMN berdasarkan Hasil Inventarisasi Aset tersebut.
- Sistem Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Kementerian Perhubungan Belum Menerapkan Penatausahaan Yang Memadai untuk menindaklanjuti temuan tersebut Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan sosialisasi dan penerapan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan persediaan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan dan SE 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tindak Lanjut Penyusunan Laporan Keuangan pada tanggal 12 – 15 Juli 2010 terhadap Satuan Kerja/UPT dibawah kewenangannya.
- Sistem Pencatatan dan Pelaporan Utang Tidak Dapat Mencatat Transaksi Hasil Akualisasi dan menindak lanjut temuan tersebut Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat telah merealisasikan dan membayarkan tunjangan beras bulan Desember 2009 kepada pegawai senilai Rp. 115.877.832 pada tanggal 8 Maret 2010.

Daftar temuan dan tindak lanjutnya dilampirkan sebagaimana format terlampir.

- Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2010 Audited terdapat beberapa satker yang dilakukan jurnal penyesuaian dan reklasifikasi aset antara lain :
 - Satker Pengembangan Fasilitas LLAJ
 - Satker Pengembangan Transportasi SDP
 - Satker Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

- Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah
- Satker Pengembangan LLASDP Jawa Tengah
- Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Selatan
- Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Selatan
- Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara

Daftar jurnal penyusain dan reklasifikasi aset terlampir.

2. DITJEN PERKERETAAPIAN

Ditjen Perkeretaapian telah melakukan langkah lanjut sesuai usulan / rekomendasi BPK-RI sebagai berikut:

- a) Telah melakukan reklasifikasi keluar dari aset tetap lainnya atas biaya sosialisasi sebesar Rp. 3.495.052.000,- pada Satker Pembangunan Jalur Ganda Tanah Abang-Serpong-Maja
- b) Telah melakukan reklasifikasi keluar dari Aset Tak Berwujud Lainnya atas biaya sosialisasi keselamatan perkeretaapian dalam bentuk iklan sebesar Rp.2.242.710.750,- pada Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian
- c) Telah melakukan transfer keluar aset Rail senilai Rp.101.286.219.467,- pada Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Prasarana Perkeretaapian
- d) Telah menindaklanjuti hasil temuan dengan menyusun Laporan Keuangan dan merekam data tersebut pada Aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN sehingga ada mutasi bertambah pada peralatan dan mesin senilai Rp. 23.154.347.020,- pada Satker Perkeretaapian Jawa Timur
- e) Telah menindaklanjuti hasil temuan dengan menyusun Laporan Keuangan dan merekam data tersebut pada Aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN sehingga ada mutasi bertambah pada peralatan dan mesin senilai Rp. 37.191.555.947,- pada Satker Pembangunan Jalur Ganda Tegal-Pekalongan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Berupa Rel UIC-54 sebanyak 2.243,876 ton dengan Nomor : 33/BA-STB/SPPFP.KA/V/2009
- f) Telah menindaklanjuti hasil temuan dengan menyusun Laporan Keuangan dan merekam data tersebut pada Aplikasi SAKPA dan SIMAK-BMN sehingga ada perubahan data pada akun Peralatan dan Mesin yang semula sebesar Rp. 64.641.556.000,- menjadi

- Rp. 105.581.845.500,- dan telah menyesuaikan CaLK Audited periode TA. 2009 pada Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya
- g) Telah melakukan reklasifikasi aset KDP sebesar Rp. 1.168.728.810.378,- ke Aset Definitif pada Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa
- h) Telah melakukan reklasifikasi keluar yang di inventasikan dalam aset Tetap senilai Rp.7.598.800,- pada Kantor Administrator Terminal Petikemas Gedebage
- i) Satker Pengembangan Sarana KA telah mencatat SP3 yang terbit 31 Desember 2009 yang disampaikan ke Satker tanggal 25 Maret 2010 senilai Rp. 435.275.346,- sehingga KDP aset Peralatan dan Mesin menjadi Rp. 126.858.836.834,-
- j) Telah melakukan reklafikasi keluar Aset Tanah berupa: Aset Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I, Aset Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II, Tanah bangunan Stasiun Penelitian, telah dilakuakn koreksi pada asset Gedung dan Bangunan berupa : Rumah Negara Gol I Tipe A permanen dari 2 unit menjadi 1 unit, dengan nilai Rp.128.300.000,- menjadi Rp.64.150.000, Rumah Negara Gol II Tipe A Permanen dari 100 unit menjadi 10 unit dengan nilai Rp.5.026.800.000,- menjadi Rp.502.680.000,-
- k) Telah melakukan reklasifikasi keluar dari asset Tetap Lainnya berupa Buku Laporan Penelitian ke Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 2.428.263.200,- pada Satker Prasarana Kereta Api Jabotabek.
- l) Telah melakukan penghapusan pada asset Tetap Lainnya berupa Kaset Video sebesar Rp. 2.047.760.000,- karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi asset pada Satker Prasarana Kereta Api Jabotabek.
- m) Satker Peningkatan Jalan KA lintas Utara Jawa telah melakukan reklasifikasi KDP senilai Rp. 570.996.943.736,- menjadi aset tetap senilai Rp. 529.983.649.346,- dengan rincian sebagai berikut:
- Peralatan dan Mesin Rp. 10.723.536.767,-
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 496.173.562.062,-
 - Gedung dan Bangunan Rp. 23.086.550.517,-
- n) Satker Perencanaan Teknis dan Pengawasan Perkeretaapian Reklasifikasi aset dari KDP senilai Rp. 265.276.529.406,- ke ATL untuk (jasa konsultasi) senilai Rp. 266.501.761.573,-

- o) Satker Perencanaan Teknis dan Pengawasan Perkeretaapian telah mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Penambahan 3 SP3 dari IP-518 & MRT senilai Rp. 18.723.769.015,-
- p) Satker Perencanaan Teknis dan Pengawasan Perkeretaapian telah mencatat utang pada pihak ketiga (jasa konsultan) senilai Rp. 3.010.459.291,- pada Aplikasi SAKPA
- q) Satker Peningkatan Jalan KA lintas Selatan Jawa telah mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 23.089.671.893,- untuk pekerjaan IP-518
- r) Satker Peningkatan Jalan KA lintas Selatan Jawa untuk mereklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 1.169.825.301.438,- menjadi Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:
- Peralatan dan Mesin Rp. 5.449.135.531,-
 - Jalan dan Jembatan Rp. 881.918.867.991,-
 - Gedung dan Bangunan Rp. 12.444.392.618,-
 - Irigasi Rp. 19.187.964.571,-
 - Jaringan Rp. 250.200.952.027,-
 - Aset Tetap Lainnya Rp. 623.988.700,-
- s) Pada satker PLU terdapat utang jasa konsultasi kepada pihak ketiga (konsultan) yang belum di bayar sebesar Rp. 5.759.614.734,-
- t) Telah melakukan penyesuaian dengan mengoreksi aset tetap berupa tanah sesuai dengan likuidasi Perjan ke Perum Tahun 1990 pada Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
- u) Telah melakukan penyesuaian Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 435.275.376,- pada Satker Pengembangan Sarana Perkeretaapian karena terdapat penambahan SP3 yang baru disampaikan dari KPPN VI (khusus) ke Satker tanggal 25 Maret 2010
- v) Telah melakukan penyesuaian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 23.089.671.893,- pada Satker Pembangunan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa karena terdapat penambahan 2 SP3 dari WA Tahun 2007 yang baru terbit SP3-nya TA 2009
- w) Telah melakukan penyesuaian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp.18.723.769.015,- pada Satker Perencanaan

Teknis dan Pengawasan Perkeretaapian karena terdapat penambahan 3 SP3 berdasarkan Peraturan bersama Dirjen PB dan Dirjen PU No. PER-10/PB/2010 & 01/PU/2010 Pasal 10 (2).

Di dalam Neraca Audited terdapat pengurangan Aset disebabkan karena Aset tersebut tidak bisa dikapitalisasi sebagai Aset, yaitu :

- a) Aset Tetap Lainnya pada Satker Pembangunan Jalur Ganda Tanah Abang – Serpong – Maja sebesar Rp. 3.495.052.000,- yang merupakan biaya sosialisasi;
- b) Aset Tak Berwujud Lainnya pada Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian sebesar Rp.2.242.710.7500,- yang merupakan biaya sosialisasi keselamatan Perkeretaapian dalam bentuk iklan.

Masih terdapat Tindak Lanjut yang belum tuntas atas Audit BPK-RI, antara lain :

- a) Pemanfaatan asset tanah seluas \pm 29.924 m² milik Ditjen Perkeretaapian oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan.

Ditjen Perkeretaapian dengan surat No. PS.314/58/KI/DJKA/IX/08 tanggal 24 September 2008 perihal Pemanfaatan Aset Milik Ditjen Perkeretaapian oleh PT. KA telah meminta kepada PT. KA (Persero) untuk meninjau setiap pemanfaatan BMN agar mengacu kepada PP No. 6 Tahun 2006 pasal 21 ayat (4) dan (5).

Selanjutnya telah dilakukan pembahasan dengan PT. KA (Persero) pada tanggal 18 Agustus 2009 dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan aset tanah milik Ditjen Perkeretaapian seluas 29.924 m² oleh pihak lain melalui ijin PT. KA di lokasi Kelurahan Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, Lenteng Agung Jakarta Selatan, dan Kemiri Muka Kabupaten Bogor pihak DAOP I akan menginventaris kontrak-kontrak yang telah dilakukan PT. KA dan akan mengkoordinasikan dengan PT. KCJ (PT. Comuter Jabotabek).
- 2) Pemanfaatan Barang Milik Negara dimohon PT. KA (Persero) untuk menunjuk kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Mengacu PP 6 tahun 2006 pasal 21 ayat (4) dan (5) tentang Pengelolaan BMN yang dilaksanakan oleh Pengguna (Departemen Perhubungan cq. Ditjen Perkeretaapian) setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Departemen Keuangan) dari hasil penyewaan tersebut merupakan Penerimaan Negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Negara

- b) Terdapat tanah pada Kementerian Perhubungan seluas 2.103.359 m² yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah

Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) oleh Tim Inventarisasi Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen Kekayaan Negara (KPKNL setempat) untuk mengetahui nilai Riil Aset Ditjen Perkeretaapian.

E. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA (*SUBSEQUENT EVENT*)

Nilai Aset tetap Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2010 (*Audited*) yang disajikan dalam Neraca belum termasuk hasil Inventarisasi dan Penilaian TIM KEPPRES 13 Tahun 2010 atas Prasarana Perkeretaapian yang terdapat pada DITJEN Perkeretaapian. Karena sampai dengan laporan ini disusun hasil inventarisasi dan penilaian tersebut belum dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK-BMN. Hasil inventarisasi dan penilaian tersebut akan dimasukkan pada laporan Kementerian Perhubungan Semester I Tahun 2011 secara bertahap dan berkoordinasi dengan KPKNL I Jakarta. Aset tetap pada Ditjen Perkeretaapian yang disajikan pada neraca sebesar Rp 80.007.078.957.656,- belum termasuk hasil IP sebesar Rp 56.019.460.015.032,-. Sehingga aset tetap Ditjen Perkeretaapian yang seharusnya pada Neraca per 31 Desember 2010 (*Audited*) adalah sebesar Rp 136.026.538.972.688,-. Adapun nilai hasil inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap Ditjen Perkeretaapian dapat disajikan sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Ruang Manfaat Jalan (Rumaja)	Rp 19.921.890.522.342
Ruang Milik Jalan (Rumija)	Rp 14.988.015.516.908
Selain Tanah	Rp 21.109.553.975.782
Total	Rp 56.019.460.015.032

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

- a) Aset Tetap Tanah

Aset tetap tanah yang disajikan pada neraca Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2010 belum dilakukan koreksi, walaupun ada temuan dari pihak BPK-RI atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan tanah untuk pembangunan kampus baru PIP Makassar yang pada tanggal 28 April pihak Kejaksaan

Negeri Makassar telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 9.403.159.995,- untuk pembayaran ganti rugi tanah/lahan kepada pihak ketiga dengan luas sebesar 184.164 m². Kementerian Perhubungan akan melakukan koreksi baik nilai maupun kuantitas apabila uang yang telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar sudah menyetorkan ke Kas Negara.

b) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanah senilai Rp 21.726.090.000,- dan Rp 1.738.125.000,- tidak didukung dengan bukti kepemilikan, ini terjadi pada pengadaan tanah untuk proyek double double track pada tahun 2005 seluas 515 m² yang terletak di kampung Melayu. Selanjutnya atas pengadaan tanah sebesar Rp 1.738.125.000,- tersebut telah diproses di pengadilan dan berdasarkan putusan hakim tanggal 15 April 2008 melalui surat No. 168/PDT.G/2008/PN.JKT.TIM. Berdasarkan keputusan tersebut KDP berupa tanah telah dilakukan koreksi sebesar Rp 1.738.125.000,-. Sedangkan untuk pembebasan tanah tahun 2006 di kampung Melayu senilai 21.726.090.000,- belum diketahui keberadaannya fisik dan sampai sekarang masih dilakukan penelitian lebih lanjut.